

**PERJUANGAN KEWARGAAN MASYARAKAT TERDAMPAK
BANJIR ROB: STUDI FENOMENOLOGI DI KECAMATAN
SAYUNG, KABUPATEN DEMAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik



Oleh:

ELY RAHMAWATI

2106016049

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

2025

NOTA PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada,

Yth. Dekan FISIP

UIN Walisongo Semarang

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara:

Nama : Ely Rahmawati

NIM : 2106016049

Jurusan : Ilmu Politik

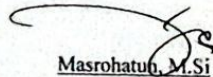
Judul Skripsi : Adaptasi Sosial dan Perjuangan Kewargaan Masyarakat Terdampak Banjir Rob: Studi Fenomenologi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Juni 2025

Pembimbing



Masrohatun M. Si
NIP. 198806212018012001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

SKRIPSI

PERJUANGAN KEWARGAAN MASYARAKAT TERDAMPAK BANJIR ROB: STUDI FENOMENOLOGI DI KECAMATAN SAYUNG, KABUPATEN DEMAK

Disusun oleh:

Ely Rahmawati

2106016049

Telah dipertahankan di depan majelis pengujian sidang skripsi pada tanggal 30
Juni 2025 dan telah dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji



Sekretaris

Drs. H. Nur Syamsudin, M.A
NIP. 196805051995031002

Penguji 1

Prof. Dr. Ahwan Fanani M.Ag
NIP. 197809302003121001

Pembimbing

Masrohatun, M.Si
NIP. 198806212018012001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya Ely Rahmawati menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Adaptasi Sosial dan Perjuangan Kewargaan Masyarakat Terdampak Banjir Rob: Studi Fenomenologi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak”** adalah hasil karya saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu universitas atau perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Temuan dan sumber dari hasil publikasi atau tidak dipublikasi dijelaskan dalam tulisan dan Daftar Pustaka.

Semarang, 25 Juni 2025



Ely Rahmawati

NIM. 2106016049

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang terang menerang dan penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penelitian skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir S-1 Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Adapun judul skripsi ini adalah “Adaptasi Sosial dan Perjuangan Kewargaan Masyarakat Terdampak Banjir Rob: Studi Fenomenologi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak”. Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan, baik moril maupun materil, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Walisongo, Prof. Dr. Nizar, M.Ag. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh Pendidikan dan menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Kepala Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo, Bapak Muhammad Nuqlir Bariklana M.Si. selaku kajar Ilmu Politik yang telah

memberikan dukungan dan arahan serta berbagai ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.

3. Sekretaris Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo sekaligus Dosen Pembimbing dan dosen wali saya tercinta, Ibu Masrohatun M.Si. yang telah sabar membimbing, memberi arahan serta masukan dan memotivasi penulis, meluangkan waktu tenaga dan pikiran kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen serta segenap jajaran civitas akademika FISIP UIN Walisongo Semarang yang sudah memberikan berbagai ilmu serta pengalaman, membantu penulis dalam memenuhi kebutuhan administrasi dalam penyusunan skripsi.
5. Untuk Alm. Nur Chamin, seseorang yang biasa saya sebut “bapak” yang paling saya rindukan dan berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah. Alhamdulillah kini penulis sudah berada ditahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai perwujudan terakhir sebelum engkau benar-benar pergi. Terimakasih untuk semua yang engkau berikan. Perhatian, kasih sayang dan cinta paling besar untuk anak gadis bungsumu ini. Engkaulah cinta pertama saya, terimakasih sudah mengantarkan saya berada ditempat ini, walaupun pada akhirnya saya harus berjuang tanpa kau temani lagi. Kemudian untuk Ibu Suwarni, seseorang yang biasa saya sebut “mamak” perempuan hebat yang sudah membesarkan dan mendidik anak-anaknya hingga mendapatkan gelar sarjana serta selalu menjadi penyemangat.

Terimakasih sudah melahirkan, merawat dan membesarkan saya dengan penuh cinta, selalu berjuang untuk kehidupan saya, menjadi tulang punggung keluarga hingga akhirnya saya bisa tumbuh dewasa dan bisa berada diposisi saat ini. Terimakasih untuk semua doa dan dukungan mamak sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi.

6. Kepada kakak-kakak penulis, Nur Chafid, Abdul Muchit, Maysaroh, dan Zaenal Arifin terimakasih banyak atas dukungannya secara moril maupun materil, terimakasih juga atas segala motivasi dan dukungannya yang diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan studinya sampau sarjana.
7. Pemerintah Kecamatan Sayung, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Demak, serta semua narasumber yang bersedia meluangkan waktu untuk wawancara dan memberi informasi kepada penulis.
8. Seluruh teman seperjuangan angkatan 2021 Ilmu Politik kelas A, B, C dan D UIN Walisongo Semarang yang tidak bisa penulis cantumkan satu persatu terimakasih atas support, bantuan dan do'anya selama masa perkuliahan.
9. Teman-teman KKN MB-18 Posko 7 yaitu Istiana, Yusuf Ihsan, Akmal Taqi, Ridwan Maulana, Aldian, Milla, Nabilla Putri, Hana Rahma, Wafiq, Fitriani, Maulidya, Asyifa, Lisna, dan Lulu Hesti atas pengalaman 45 harinya kita bersama berproses dan mengabdikan di Kelurahan Ngijo dengan penuh keluh kesah, canda tawa kita lalui

bersama seperti saudara yang saling support dan saling memberikan do'a yang terbaik.

10. Teman-teman Magang PPL Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang yaitu Retno Indah, Rahma Latifa, Yuliana Ifada, dan Wirawan Sofyananta atas pengalaman dan ilmu yang diberikan selama magang.
11. Sahabat tercinta penulis di bangku perkulahan Vina Damelia, Retno Indah, Putri Eninda, dan Laviota Ayu yang kebersamaan dari awal hingga akhir perkuliahan, terimakasih karena memberikan warna indah di masa-masa ini, terimakasih selalu memberikan kenyamanan, kehangatan dan kepercayaan kepada penulis. Terimakasih sudah menjadi partner di segala kondisi yang kadang tidak terduga.
12. Sahabat kecil penulis yaitu Ririn, Zara, Siti Qudhoifah, dan Rika Antika yang telah bersedia mendengarkan segala keluh kesah saya dalam menghadapi banyaknya *struggle*, dan juga telah memberikan semangat serta meyakinkan saya bahwa saya bisa menyelesaikannya.
13. Teruntuk seseorang yang belum bisa dituliskan namanya dengan jelas disini, namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz* untuk penulis, terima kasih sudah menjadi sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu upaya dalam memantaskan diri. Karena penulis percaya bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya.

14. Last but not least. Terima kasih untuk penulis diriku sendiri, Ely, yang telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan Skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhir kata, penulis dapat menyadari tanpa Ridho dan pertolongan dari Allah SWT, serta bantuan, dukungan, motivasi dari segala pihak skripsi ini tidak dapat diselesaikan. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan ini, penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT membalas segera kebaikan kalian. Aamiin Yarabbal 'alamin.

Semarang, 25 Juni 2025

Penulis

Ely Rahmawati

NIM. 2106016049

PERSEMBAHAN

-be kind, be humble, be love-

Alhamdulillahirabbil Allamin, karya ini merupakan bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat karunia pertolongan yang tiada henti hingga saat ini

Karya ini saya persembahkan sebagai tanda bukti sayang dan cinta yang tiada terhingga kepada kedua Orang Tua tercinta, Bapak Nur Chamin (Alm) dan Ibu Suwarni yang telah melahirkan, merawat, membimbing, dan melindungi dengan tulus serta penuh keikhlasan, mencurahkan segala kasih sayang dan cintanya, serta yang senantiasa mendoakan, dan memberika semangat dan juga dukungan sepenuh hati.

Karya ini juga saya persembahkan kepada seluruh keluarga tercinta yaitu abang, kakak dan keponakan yang selalu menjadi penyemangat terbaik, selalu memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun material. Tak lupa dipersembahkan kepada diri sendiri, terima kasih telah bertahan sejauh ini, dan tidak pernah berhenti berusaha dan berdoa untuk menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(Q.S Al-Baqarah:286)

god have perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and it takes a lot of faith, but it's a worth the wait"

"aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir kedunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya."

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika adaptasi sosial dan perjuangan kewargaan masyarakat pesisir yang terdampak banjir rob di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Banjir rob yang telah berlangsung lebih dari satu dekade telah menimbulkan dampak multidimensional terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari kerusakan infrastruktur, terganggunya akses terhadap air bersih, pendidikan, hingga hilangnya sumber mata pencaharian. Dalam menghadapi kondisi tersebut, masyarakat Sayung tidak hanya melakukan adaptasi fisik dan ekonomi, seperti peninggian rumah dan perubahan profesi, tetapi juga menempuh berbagai bentuk perjuangan politik kewargaan untuk menuntut hak-hak dasar mereka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan dan pendekatan fenomenologi untuk menggali pengalaman subjektif warga yang terdampak. Teori politik kewargaan Kristian Stokke digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana warga negara secara aktif mengklaim hak melalui praktik sosial-politik di tengah keterbatasan respons negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mempraktikkan bentuk-bentuk perjuangan seperti pengajuan proposal pembangunan, aksi demonstrasi, hingga mobilisasi digital melalui media sosial. Sementara itu, respon pemerintah dinilai belum optimal karena keterbatasan sumber daya dan lemahnya koordinasi antarlembaga. Penelitian ini menyoroti pentingnya integrasi antara strategi adaptasi berbasis komunitas dan respons kebijakan negara yang inklusif dan berkelanjutan. Secara teoretis, studi ini memperluas penerapan konsep kewargaan dalam konteks bencana ekologis dan menegaskan bahwa hak atas lingkungan yang layak merupakan bagian integral dari hak kewargaan yang harus dijamin oleh negara. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan publik yang responsif terhadap kelompok masyarakat rentan serta memperkaya khazanah kajian sosiologi politik di ranah bencana dan perubahan iklim.

Kata Kunci: banjir rob, adaptasi sosial, perjuangan masyarakat, politik kewargaan

ABSTRACT

This study aims to understand the dynamics of social adaptation and civic struggles of coastal communities affected by tidal flooding in Sayung District, Demak Regency. The tidal flooding that has lasted for more than a decade has had a multidimensional impact on people's lives, ranging from infrastructure damage, disruption of access to clean water, education, to loss of livelihoods. In dealing with these conditions, the Sayung community not only carried out physical and economic adaptations, such as raising houses and changing professions, but also undertook various forms of civic political struggles to demand their basic rights.

This study uses a qualitative approach with field study methods and a phenomenological approach to explore the subjective experiences of affected residents. Kristian Stokke's civic political theory is used as an analytical framework to understand how citizens actively claim rights through socio-political practices amidst limited state responses.

The results of the study show that the community practices forms of struggle such as submitting development proposals, demonstrations, and digital mobilization through social media. Meanwhile, the government's response is considered less than optimal due to limited resources and weak coordination between institutions. This study highlights the importance of integrating community-based adaptation strategies with inclusive and sustainable state policy responses. Theoretically, this study extends the application of the concept of citizenship in the context of ecological disasters and emphasizes that the right to a decent environment is an integral part of citizenship rights that must be guaranteed by the state. These findings are expected to contribute to the formulation of public policies that are responsive to vulnerable community groups and enrich the treasury of political sociology studies in the realm of disasters and climate change.

Keywords: tidal flood, social adaptation, community struggle, citizenship politics

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian.....	26
H. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	27
I. Sumber Data	28
J. Teknik Pengumpulan Data	30
K. Teknik Analisis Data	33
L. Sistematika Penulisan.....	34

BAB II KERANGKA TEORI	37
A. Penjelasan Konsep.....	37
1. Konsep Dasar Politik dan Hak-Hak Kewargaan.....	37
2. Politik Kewargaan: Konsep dan Perkembangannya	38
3. Teori Politik Kewargaan Kristian Stokke	41
4. Integrasi dengan Pendekatan Fenomenologi	48
5. Kontribusi Teoretik	48
BAB III GAMBARAN UMUM.....	50
A. Gambaran Umum Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak...	50
1. Kondisi Geografis Kecamatan Sayung	50
2. Kondisi Demografis.....	51
3. Kondisi Sosial-Ekonomi dan Infrastruktur	52
4. Permasalahan Lingkungan: Banjir Rob	54
5. Sejarah Kecamatan Sayung	55
6. Visi dan Misi Kecamatan Sayung.....	57
B. Gambaran Umum Bencana Rob Kecamatan Sayung.....	58
1. Penurunan Muka Tanah (Land Subsidence)	59
2. Kenaikan Muka Air Laur (Land Sea Level)	59
3. Degradasi Ekosistem Pesisir.....	59
4. Alih Fungsi Lahan dan Tata Ruang yang Tidak Berkelanjutan.....	60
5. Kerusakan Infrastruktur Penahan Air	60
6. Akibat Terjadinya Bencana Banjir Rob	61
7. Upaya Adaptasi yang dilakukan oleh Masyarakat terdampak	63

BAB IV PERJUANGAN MASYARAKAT TERDAMPAK BANJIR ROB DALAM MENUNTUT HAK KEWARGAAN.....	80
A. Bentuk Perjuangan Melalui Aksi Kolektif dalam Menuntut Hak Kewargaan	80
1. Viralitas sebagai Strategi Advokasi Digital	80
2. Proposal sebagai Instrumen Negosiasi Kewargaan dalam Perjuangan Masyarakat Sayung.....	84
B. Bentuk Perjuangan Melalui Organisasi Masyarakat	97
BAB V LATAR BELAKANG PERJUANGAN MASYARAKAT SAYUNG DALAM MEMPERJUANGKAN HAK KEWARGAANNYA	103
A. Ketidaksetaraan Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat.	103
B. Ketidakpuasan Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah 106	
1. Respon Pemerintah Kurang Tanggap dalam Mengatasi Permasalahan Banjir Rob	106
2. Pembangunan Jalan Tol Sebagai Solusi Menicu Terjadinya Permasalahan Lain.....	109
C. Tuntutan Masyarakat atas Pemenuhan Hak Dasar	112
1. Tidak Terpenuhinya Hak Atas Tempat Tinggal yang Layak	113
2. Tidak Terpenuhinya Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak.....	115
3. Tidak Terpenuhinya Hak Atas Kesehatan dan Lingkungan Hidup yang Bersih.....	118

4. Tidak Terpenuhi Hak Atas Pendidikan.....	120
5. Tidak Terpenuhi Hak Atas Rasa Aman dan Perlindungan Sosial	122
BAB VI PENUTUP.....	126
A. KESIMPULAN	126
B. SARAN	127
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN	134

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kecamatan Sayung Tahun 2023	51
Tabel 2. Banyaknya Desa yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Sayung 2021-2023	53
Tabel 3. Banyaknya Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Sayung 2021-2023	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administrasi Kecamatan Sayung	51
Gambar 2. Kondisi Jalan di Desa Sriwulan.....	65
Gambar 3. Kondisi Rumah yang Telah Direnovasi	68
Gambar 4. Penggunaan Tanggul Darurat oleh Warga	71
Gambar 5. Pembangunan Tanggul Permanen oleh Pemerintah.....	72
Gambar 6. Dampak Banjir Rob Mengakibatkan Alih Mata Pencaharian Warga	74
Gambar 7. Madrasah Apung yang Didirikan oleh NU	77
Gambar 8. Akun Media Sosial sebagai Arena Advokasi Warga.....	82
Gambar 9. Istighosah bersama oleh NU didepan Pabrik Polytron	98
Gambar 10. Wawancara dengan PCNU Kabupaten Demak.....	100
Gambar 11. Kondisi Rumah Warga Terdampak Banjir Rob di Desa Sidogemah.....	114
Gambar 12. Perubahan Lahan Tambak di Desa Sidogemah Tahun 2010 dan 2025	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Demak merupakan salah satu daerah pesisir di Indonesia yang sering dilanda banjir rob. Pesisir merupakan daerah pertemuan atau peralihan daratan serta lautan yang saling mempengaruhi maupun dipengaruhi secara fisik, sosial, dan ekonomi. Terdapat permasalahan serius yang menjadi isu strategis pada wilayah pesisir. Salah satunya yaitu pesisir rentan terhadap perubahan lingkungan dan bencana banjir pasang air rob, sehingga kondisi tersebut dapat menjadi salah satu bencana yang krusial dihadapi daerah pesisir Pulau Jawa (Subagiyo, Wijayanti, & Zakiyah, 2017). Ada empat kecamatan yang sering terkena banjir rob yakni Kecamatan Sayung, Bonang, Karang Tengah dan Wedung (Marfai & Cahyadi, 2015).

Kecamatan Sayung adalah merupakan satu kecamatan yang berada di pesisir Kabupaten Demak, dimana langsung terhubung dengan Laut Jawa. Daerah-daerah ini dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut yang mengalami proses secara alami pada area daratan. Wilayah pesisir memiliki berbagai macam potensi masalah seperti banjir pasang atau banjir rob serta penurunan muka tanah. Hal tersebut terjadi karena level permukaan air laut yang lebih tinggi dibandingkan dengan ketinggian muka tanahnya (Haloho & Purnaweni, 2020). Banjir rob seringkali dianggap sebagai hal yang lumrah untuk sebagian masyarakat pesisir khususnya bagi yang

bertempat tinggal berbatasan dengan laut. Namun jika kondisi ini terus dibiarkan, tak menutup kemungkinan rob akan menjadi salah satu faktor kerentanan masyarakat pesisir. Hal ini dikarenakan rob yang terjadi bukan hanya sudah menggerus bibir pantai, namun lebih dari itu, yaitu telah masuk ke pemukiman pesisir bahkan telah menenggelamkan pemukiman warga (Pradoto & Ariviyanti, 2014).

Banjir rob merupakan fenomena banjir yang terjadi akibat naiknya permukaan air laut sehingga menggenangi wilayah pesisir. Kecamatan Sayung di Kabupaten Demak telah mengalami banjir rob yang berkepanjangan, berlangsung lebih dari satu dekade. Kondisi ini telah menimbulkan berbagai dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat setempat, termasuk perubahan mata pencaharian, adaptasi infrastruktur perumahan, serta akses terhadap hak dasar seperti air bersih, sanitasi, kesehatan, dan infrastruktur lainnya. Dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat Kecamatan Sayung cukup signifikan. Banyak petani tambak dan petani lahan kering kehilangan mata pencaharian akibat lahan mereka terendam banjir rob secara terus-menerus. Hal ini memaksa mereka beralih profesi menjadi buruh pabrik sebagai upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup (Damawyanti, 2013). Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi pendapatan, tetapi juga mengubah struktur sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Penelitian menunjukkan bahwa dampak banjir rob di wilayah pesisir Kecamatan Sayung meliputi aspek ekonomi, sosial, dan kerusakan fasilitas umum (Hanifah, 2021).

Selain itu, masyarakat terdampak harus melakukan penyesuaian terhadap kondisi perumahan mereka. Rumah-rumah warga harus ditinggikan secara berkala untuk menghindari air rob masuk ke dalam rumah, umumnya mereka meninggikan setiap 3 hingga 4 tahun sekali, seperti yang disampaikan oleh warga Dukuh Pangkalan (Sari, 2024). Upaya peninggian rumah ini menjadi rutinitas tahunan bagi sebagian besar warga, menambah beban finansial dan psikologis mereka. Penelitian di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, menunjukkan bahwa masyarakat melakukan adaptasi fisik seperti meninggikan rumah sebagai respons terhadap banjir rob (Haloho & Purnaweni, 2020).

Banjir rob yang terjadi di Sayung, Demak, telah menjadi masalah lingkungan yang serius dan berkelanjutan, menghambat berbagai aktivitas masyarakat setempat. Fenomena ini tidak hanya menyebabkan genangan air di permukiman, tetapi juga mengakibatkan kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Seperti yang terjadi di Desa Sriwulan, salah satu masalah utama yang timbul adalah kesulitan dalam mendapatkan air bersih, yang sangat dibutuhkan untuk kegiatan sehari-hari seperti memasak dan mandi. Banjir rob menyebabkan ketersediaan air bersih menjadi sangat terbatas, sehingga masyarakat harus mengantre untuk mendapatkan pasokan air bersih yang dibawa oleh truk tangki dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan PDAM Demak (Saifudin, 2022).

Menghadapi ancaman yang terus meningkat, masyarakat Kecamatan Sayung telah mengembangkan berbagai strategi adaptasi untuk bertahan hidup. Berbagai bentuk adaptasi yang dilakukan mencakup peninggian bangunan rumah, pembuatan tanggul atau tembok penahan air, serta penggunaan saluran drainase yang lebih baik untuk mengurangi genangan air rob. Selain itu, masyarakat juga berusaha untuk memanfaatkan teknologi sederhana seperti pompa air untuk mengalirkan air rob keluar dari rumah mereka. Namun, meskipun strategi-strategi tersebut cukup membantu dalam mengurangi dampak langsung banjir rob, fenomena ini masih tetap menjadi tantangan besar bagi masyarakat Sayung. Penurunan kualitas tanah, kerusakan terhadap lahan pertanian dan tambak, serta ancaman terhadap ketersediaan sumber daya alam di pesisir semakin membatasi efektivitas adaptasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat (Jumatiningrum & Indrayati, 2021).

Di sisi lain, meskipun pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Demak, telah berusaha untuk merespons dengan berbagai kebijakan dan program penanggulangan, respons yang diberikan masih dianggap kurang efektif dan memadai. Program seperti pembangunan tanggul laut, pemeliharaan ekosistem mangrove, serta bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak sering kali terhambat oleh masalah anggaran dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Pada kenyataannya, sejumlah inisiatif pemerintah seperti perbaikan infrastruktur dan penyediaan fasilitas penanggulangan banjir rob terkendala oleh keterbatasan

dana dan sumber daya yang tersedia. Lebih jauh lagi, meskipun ada kebijakan yang mengarah pada upaya mitigasi bencana, pemenuhan hak dasar masyarakat terdampak, seperti akses terhadap air bersih dan tempat tinggal yang layak, belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang masih harus berjuang untuk mendapatkan layanan dasar yang mereka butuhkan dalam menghadapi bencana banjir rob yang terus berulang.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai strategi adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sayung dalam mengakses hak dasar di tengah kondisi lingkungan yang terus terancam oleh banjir rob. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana respons Pemerintah Kabupaten Demak dalam memastikan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat terdampak banjir rob, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pemerintah dalam memenuhi kewajibannya untuk melindungi warganya dari bencana alam tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk memahami pengalaman langsung masyarakat yang terdampak banjir rob serta respons pemerintah terhadap permasalahan yang ada.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika sosial dan kebijakan yang berhubungan dengan adaptasi masyarakat pesisir dan peran pemerintah dalam mitigasi bencana. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis yang dapat digunakan oleh

pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan penanggulangan banjir rob serta meningkatkan pemenuhan hak dasar masyarakat yang terdampak, terutama dalam hal akses terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih, perumahan yang aman, dan perlindungan sosial yang memadai. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori adaptasi masyarakat dalam konteks bencana alam serta kebijakan publik dalam menghadapi perubahan iklim di kawasan pesisir.

B. Rumusan Masalah

1. Apa bentuk perjuangan masyarakat terdampak banjir rob dalam menuntut hak kewargaan?
2. Apa yang melatarbelakangi perjuangan masyarakat sayung dalam memperjuangkan hak kewargaannya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat terdampak banjir rob dalam menuntut hak-hak kewargaan mereka.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi perjuangan masyarakat dalam memperjuangkan hak kewargaannya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat: Memberikan wawasan dan strategi adaptasi yang telah terbukti efektif dalam menghadapi banjir rob, sehingga bisa dijadikan contoh atau inspirasi bagi masyarakat lain di wilayah rawan bencana serupa.
- b. Bagi Pemerintah Daerah: Menyediakan informasi tentang kebutuhan, strategi, dan kendala yang dihadapi masyarakat, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan penanggulangan banjir rob.
- c. Bagi Lembaga Sosial dan NGO: Memberikan data lapangan yang relevan untuk perumusan program sosial berbasis kebutuhan riil masyarakat terdampak banjir rob.

2. Manfaat Teoritis

- a. Menambah Literatur Akademik tentang Banjir Rob dan Dampaknya: Penelitian ini akan menambah khazanah literatur akademik mengenai fenomena banjir rob, khususnya di wilayah pesisir Indonesia. Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak banjir rob terhadap masyarakat, serta tantangan dan peluang dalam upaya penanganannya.
- b. Menjadi Referensi bagi Penelitian Selanjutnya: Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji isu serupa, baik di wilayah yang sama maupun di

wilayah lain dengan karakteristik yang mirip. Penelitian ini dapat mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*) yang belum terjawab dan mendorong penelitian yang lebih mendalam.

- c. Penguatan Teori Fungsionalisme Struktural: Menambah literatur empiris yang mendukung bagaimana sistem sosial dan struktur (seperti pemerintah dan lembaga lokal) berfungsi dalam menjaga stabilitas masyarakat saat menghadapi krisis.
- d. Penerapan Perspektif Fenomenologis: Menyumbang pada pemahaman teoritis tentang pengalaman subjektif masyarakat yang dapat memperkaya pendekatan kualitatif dalam studi adaptasi sosial.

E. Tinjauan Pustaka

Sebagai upaya untuk memahami dan menganalisis fenomena yang menjadi fokus penelitian ini, penting untuk melakukan tinjauan pustaka yang komprehensif. Tinjauan Pustaka berfungsi sebagai landasan teoritis yang mendukung penelitian ini, serta memberikan konteks yang lebih luas mengenai topik yang diteliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan dijadikan sebagai gambaran ataupun perbandingan dalam penelitian.

1. Banjir Rob

Penelitian tentang banjir rob telah dilakukan oleh Syafitri & Rochani (2021), Marfai & Cahyadi (2014), Amin (2024), Kusuma, Liesnoor, & Suhandini (2016), Sarasadi & Rudiarto (2021), Jumatinigrum & Indrayati (2021), Adik Rommiyati & Ilya Ainun (2024). Syafitri & Rochani (2021) menyoroti bahwa kurangnya infrastruktur pengendali banjir dan alih fungsi lahan memperburuk situasi, yang berdampak pada kerusakan infrastruktur, perekonomian, dan kesehatan masyarakat. Kemudian Marfai & Cahyadi (2015) menekankan pentingnya strategi mitigasi yang meliputi pendekatan struktural dan non-struktural untuk mengatasi kerugian akibat banjir rob.

Dalam kajiannya, Amin (2024) menambahkan bahwa kerentanan masyarakat terhadap banjir rob paling tinggi pada aspek sosial dan ekonomi, dan menyarankan perlunya optimalisasi strategi mitigasi yang telah diterapkan oleh pemerintah, seperti pembangunan tanggul dan pengembangan UMKM. Penelitian oleh Kusuma et al. (2016) menunjukkan bahwa banjir rob menyebabkan perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, yang beradaptasi dengan cara meninggikan tempat tinggal dan mencari mata pencaharian alternatif.

Sementara dalam penelitiannya, Sarasadi & Rudiarto (2021) menemukan bahwa strategi adaptasi yang efektif meliputi pengurukan jalan dan peninggian bangunan. Sementara itu,

Jumatiningrum & Indrayati (2021) mencatat bahwa masyarakat di Kelurahan Bandengan tetap bertahan di rumah meskipun terendam banjir, dengan menerapkan strategi seperti meninggikan rumah dan membuat saluran air. Terakhir, Adik Rommiyati & Ilya Ainun (2024) menunjukkan bahwa penanganan banjir di Demak menggabungkan pendekatan modern dengan nilai-nilai budaya lokal, yang dapat meningkatkan efektivitas mitigasi.

Secara keseluruhan, berbagai penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi yang sinergis antara pengembangan infrastruktur yang tangguh, peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat, dan penerapan pendekatan berbasis budaya dalam upaya menghadapi tantangan banjir rob di kawasan pesisir. Pendekatan yang holistik ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ketahanan wilayah pesisir terhadap ancaman banjir, tetapi juga memastikan bahwa strategi yang diterapkan sesuai dengan kondisi lokal, nilai-nilai sosial, dan kearifan tradisional yang telah lama berkembang di komunitas pesisir.

2. Adaptasi

Penulis telah mengelompokkan penelitian terdahulu yang membahas tentang adaptasi, diantaranya Sarasadi & Rudiarto (2021), Jumatiningrum & Indrayati (2021), Munawaroh (2020), Kamal (2022), dan Asrofi dkk (2017). Penelitian tentang adaptasi masyarakat pesisir terhadap banjir rob menunjukkan berbagai strategi yang diterapkan untuk mengurangi dampak bencana. Sarasadi & Rudiarto (2021) di Kecamatan Sayung, Demak,

menemukan bahwa peninggian lantai bangunan dan pengurukan jalan efektif dalam mengurangi dampak rob, namun kapasitas adaptasi masih perlu ditingkatkan. Kemudian Jumatiningrum & Indrayati (2021) mengungkapkan bahwa masyarakat bertahan di rumah karena keterbatasan ekonomi, dengan strategi adaptasi berupa peninggian rumah, pembuatan selokan, dan penutupan saluran drainase. Sementara Munawaroh (2020) mengidentifikasi tiga strategi adaptasi masyarakat Sayung yakni perlindungan (dinding pantai, mangrove), penginapan (renovasi rumah, perubahan mata pencaharian), dan mundur (relokasi).

Kamal (2022) dalam penelitiannya menemukan adaptasi fisik seperti peninggian lantai rumah dan pembangunan tanggul, serta adaptasi sosial dan ekonomi dalam menghadapi banjir rob. Dalam kajiannya Asrofi dkk (2017) di Desa Bedono menyoroti adaptasi fisik (meninggikan rumah, membangun tanggul) dan ekonomi (perubahan mata pencaharian). Mereka juga menghadapi tantangan keterbatasan sumber daya dan dukungan pemerintah yang terbatas.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu ini menggambarkan bahwa masyarakat pesisir di berbagai wilayah telah mengimplementasikan berbagai strategi adaptasi fisik, sosial, dan ekonomi untuk mengatasi dampak banjir rob. Namun tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, intensitas bencana yang semakin meningkat, dan kurangnya dukungan pemerintah yang memadai. Oleh karena itu,

peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat dan dukungan kebijakan yang lebih kuat sangat diperlukan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana alam yang semakin sering terjadi.

3. Pemenuhan Hak Dasar

Kajian terkait Pemenuhan Hak Dasar sudah banyak diteliti oleh para peneliti diantaranya Susilawati dkk (2025), Prasetyoningsih & Ichsan (2024), dan Faturohman dkk (2024). Beberapa artikel yang membahas pemenuhan hak asasi manusia menunjukkan tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses hak-hak dasar, seperti air bersih, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lingkungan yang sehat. Susilawati dkk (2025) dalam penelitiannya mengidentifikasi penelitian ini mengidentifikasi dampak banjir rob, seperti gangguan akses air bersih, kerusakan infrastruktur, dan dampak kesehatan. Hasilnya menunjukkan 1.400 kepala keluarga terdampak, dengan rekomendasi perbaikan infrastruktur, penguatan tanggul, dan manajemen risiko adaptif.

Prasetyoningsih & Ichsan (2024) menekankan pentingnya menjaga hak asasi bagi korban bencana, dengan ketentuan bahwa pengambilan hak asasi manusia dalam keadaan darurat harus memenuhi persyaratan tertentu agar tidak melanggar prinsip hak asasi manusia internasional. Sedangkan Faturohman dkk (2024) dalam penelitiannya membahas dampak perubahan iklim terhadap hak asasi manusia, seperti hak atas hidup, kesehatan,

pangan, udara, dan tempat tinggal. Perubahan iklim meningkatkan bencana alam yang mengancam hak dasar masyarakat. Penelitian ini menyarankan perlindungan hukum dan strategi adaptasi untuk melindungi hak-hak tersebut.

Kesimpulannya, ketiga artikel tersebut menunjukkan tantangan dalam pemenuhan hak dasar masyarakat akibat bencana dan perubahan iklim. Banjir rob menyebabkan gangguan akses air bersih, kerusakan infrastruktur, dan dampak kesehatan yang mempengaruhi banyak kepala keluarga, dengan rekomendasi untuk perbaikan infrastruktur dan penguatan tanggul. Dalam keadaan darurat, hak asasi manusia harus dijaga dan memenuhi persyaratan tertentu agar tidak melanggar prinsip internasional. Selain itu, perubahan iklim memperburuk bencana alam yang mengancam hak dasar seperti hak atas hidup, kesehatan, pangan, udara, dan tempat tinggal, sehingga perlindungan hukum dan strategi adaptasi diperlukan untuk melindungi hak-hak tersebut.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah disusun oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian ini memiliki kecenderungan yang serupa dengan penelitian sebelumnya, yaitu mengkaji tentang sosiologi politik. Oleh karena itu, penelitian ini bukan merupakan suatu kajian yang sepenuhnya baru, melainkan sebuah upaya untuk memperkaya kajian sosiologi politik yang telah ada. Namun, penelitian ini memiliki keunikan tersendiri dengan menitikberatkan pada fokus dan lokus yang lebih spesifik,

yakni diwilayah masyarakat yang terdampak banjir rob. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru serta kontribusi yang lebih mendalam dalam memahami dinamika sosiologi politik di tengah tantangan bencana lingkungan.

F. Kerangka Teori

1. Penjelasan Konsep

a. Konsep Dasar Politik dan Hak-Hak Kewargaan

Istilah 'politik' berasal dari bahasa Yunani 'polis', yang berarti kota atau negara-kota, dan 'politikos', yang mengacu pada segala sesuatu yang berhubungan dengan warga negara. Dalam pengertian modern, politik tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan publik, tetapi juga dengan proses-proses sosial yang menentukan bagaimana sumber daya dialokasikan, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana hubungan antara negara dan masyarakat terbentuk. Politik juga mencakup mekanisme kontrol, partisipasi, dan representasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Crick, 2005).

Dalam kerangka negara modern, salah satu fondasi utama politik adalah hak-hak kewargaan (*citizenship rights*). Kewargaan, dalam pengertian yang luas, tidak hanya menunjuk pada status legal sebagai anggota suatu negara, tetapi juga merujuk pada hubungan yang dinamis antara

individu dan negara, yang diatur melalui seperangkat hak dan kewajiban. T.H. Marshall (1950) dalam karya klasiknya mengklasifikasikan hak-hak kewargaan ke dalam tiga kategori besar: hak sipil, hak politik, dan hak sosial.

Pertama, hak sipil (*civil rights*) mencakup hak-hak dasar individu yang memberikan perlindungan terhadap kebebasan pribadi. Ini meliputi kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas keadilan, dan perlindungan hukum. Kedua, hak politik (*political rights*) mencakup hak warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, seperti memilih, dipilih, dan terlibat dalam aktivitas politik. Ketiga, hak sosial (*social rights*) menyangkut hak atas kesejahteraan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta standar hidup yang layak.

Dalam konteks masyarakat yang terdampak oleh bencana ekologis seperti banjir rob, hak-hak ini sering kali terabaikan. Misalnya, ketika akses terhadap infrastruktur, layanan publik, atau perlindungan lingkungan tidak terpenuhi secara adil dan merata, maka negara dianggap gagal dalam menjamin hak-hak sipil dan sosial warganya. Oleh karena itu, studi tentang adaptasi masyarakat terhadap banjir rob tidak dapat dilepaskan dari analisis terhadap bagaimana negara memenuhi atau mengabaikan hak-hak kewargaan tersebut.

b. Politik Kewargaan: Konsep dan Perkembangannya

Politik kewargaan (*citizenship politics*) merupakan konsep yang berkembang dari pemikiran tentang hak-hak kewargaan menuju pada pemahaman yang lebih aktif tentang bagaimana warga negara memperjuangkan hak-haknya dalam relasi dengan negara. Tidak semua hak kewargaan secara otomatis diberikan oleh negara; sering kali warga negara harus memperjuangkannya melalui proses politik yang kompleks, baik melalui jalur institusional maupun aksi kolektif di ruang publik.

Dalam kajian Isin dan Turner (2002), kewargaan dipahami sebagai praktik sosial dan politik yang terus dinegosiasikan. Warga negara bukan hanya penerima pasif kebijakan negara, tetapi juga agen aktif yang terlibat dalam produksi, reproduksi, dan transformasi norma-norma kewargaan. Politik kewargaan melibatkan berbagai bentuk perjuangan sosial yang bertujuan untuk mengakses hak, mendapatkan pengakuan, serta memperjuangkan keadilan sosial dan ekologis.

Dalam konteks bencana, seperti banjir rob di wilayah pesisir, politik kewargaan menjadi penting karena memperlihatkan bagaimana masyarakat berupaya memperjuangkan haknya atas lingkungan yang aman, akses terhadap infrastruktur, serta tanggapan cepat dari pemerintah daerah. Ketika respons pemerintah dinilai lamban atau tidak

memadai, masyarakat terdampak sering kali membentuk forum warga, melakukan aksi protes, hingga menggandeng organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat suara mereka dalam sistem politik lokal.

Berikut adalah penjelasan politik kewargaan menurut para ahli:

1. Bryan S. Turner

Turner (1993) menjelaskan politik kewargaan sebagai arena konflik dan negosiasi antara warga negara dan negara mengenai hak-hak sosial, sipil, dan politik. Baginya, kewargaan bukan hanya status hukum, tetapi juga praktik sosial dan politik yang memungkinkan individu menuntut hak dan menjalankan kewajiban.

2. T.H. Marshall

Marshall (1950) adalah tokoh awal yang mengklasifikasikan kewargaan dalam tiga dimensi:

- 1) Hak Sipil: kebebasan individu, hak atas keadilan.
- 2) Hak Politik: hak memilih dan dipilih, serta berpartisipasi dalam pemerintahan.
- 3) Hak Sosial: hak atas kesejahteraan dan standar hidup layak.

Politik kewargaan menurut Marshall adalah bagaimana masyarakat memperjuangkan ketiga dimensi tersebut agar diakui dan dipenuhi oleh negara.

3. Will Kymlicka

Kymlicka (1995) menyoroti politik kewargaan dari perspektif multikulturalisme. Ia berpendapat bahwa negara harus mengakui perbedaan identitas etnis, budaya, dan agama dalam kebijakan kewargaan. Menurutnya, politik kewargaan harus inklusif terhadap kelompok minoritas.

4. Engin F. Isin

Isin (2002) melihat kewargaan sebagai praktik aktif (*acts of citizenship*). Menurutnya, warga negara bukan hanya penerima hak, tetapi juga agen yang menciptakan hak melalui aksi kolektif, seperti demonstrasi, advokasi, dan gugatan hukum.

5. Kristian Stokke

Menurut Kristian Stokke (2017), politik kewargaan adalah strategi warga negara untuk mengklaim hak-haknya melalui keterlibatan politik dan mobilisasi kolektif, terutama di wilayah yang mengalami marginalisasi oleh negara. Stokke menekankan bahwa kewargaan bukanlah hal yang pasif dan statis, tetapi merupakan proses kontestasi dan perjuangan untuk pengakuan dan pemenuhan hak.

Ia menyebut bahwa politik kewargaan tumbuh dari bawah (*bottom-up*), melalui prakarsa masyarakat

sipil, organisasi lokal, dan gerakan sosial yang mendesak negara untuk bertanggung jawab.

Dari berbagai pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa *politik kewargaan adalah proses dinamis di mana warga negara memperjuangkan hak-haknya, baik secara formal melalui mekanisme hukum dan pemilu, maupun secara informal melalui aksi-aksi kolektif. Para ahli sepakat bahwa kewargaan tidak hanya soal status, tetapi juga soal praktik sosial dan politik* untuk membangun keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat.

2. Teori Politik Kewargaan Kristian Stokke

a. Konsep Politik Kewargaan Kristian Stokke

Kristian Stokke merupakan salah satu pemikir kontemporer yang menekankan pentingnya memandang kewargaan tidak hanya sebagai status legal atau administratif, tetapi sebagai proses sosial dan politik yang mencerminkan perjuangan warga negara untuk mengklaim hak-haknya. Dalam karyanya, Stokke (2009, 2017) memperkenalkan konsep '*claim-making practices*', yaitu praktik pengajuan klaim oleh warga negara terhadap negara terkait pemenuhan hak-hak dasar.

Menurut Stokke, politik kewargaan muncul dalam konteks di mana negara tidak sepenuhnya hadir atau responsif

terhadap kebutuhan warganya, terutama di negara-negara berkembang. Dalam situasi tersebut, warga negara membentuk praktik kewargaan melalui mobilisasi sosial, advokasi hak, dan interaksi politik yang bersifat informal maupun formal. Praktik-praktik ini dapat berbentuk demonstrasi, pengajuan proposal pembangunan, kampanye media sosial, hingga kolaborasi dengan LSM atau organisasi berbasis komunitas.

Stokke menekankan bahwa politik kewargaan sangat penting dalam menghadapi marginalisasi struktural, di mana kelompok tertentu tidak memperoleh akses yang adil terhadap layanan publik, perlindungan hukum, atau infrastruktur dasar. Dalam konteks Kecamatan Sayung, politik kewargaan menjadi kerangka yang relevan untuk memahami bagaimana masyarakat yang terdampak banjir rob menyusun strategi adaptasi sembari memperjuangkan hak-haknya melalui saluran-saluran sosial-politik yang tersedia. Dengan demikian, pendekatan Stokke memperluas pemahaman kita tentang adaptasi masyarakat, bukan hanya sebagai upaya bertahan secara fisik, tetapi juga sebagai proses politik untuk menegosiasikan keberadaan dan keberhakannya di hadapan negara.

Teori politik kewargaan yang dikembangkan oleh Kristian Stokke menawarkan perspektif komprehensif untuk memahami dinamika kewarganegaraan dalam konteks politik

kontemporer. Stokke mengadvokasi pemahaman luas tentang kewarganegaraan yang melampaui definisi legal tradisional, menekankan pentingnya memandang kewarganegaraan sebagai konsep multidimensi yang mencakup aspek kultural, yuridis, sosial, dan politik.

b. Asumsi dasar Teori Politik Kewargaan Kristian Stokke

Fondasi utama teori Stokke terletak pada konseptualisasi kewarganegaraan sebagai kerangka kerja untuk menganalisis konflik politik seputar inklusi dan eksklusi. Dalam pandangannya, kewarganegaraan tidak hanya status hukum, tetapi merupakan proses dinamis yang dibentuk oleh relasi kekuasaan kontekstual dan perjuangan politik. Stokke mengidentifikasi empat dimensi kunci kewarganegaraan:

1) Kewargaan sebagai keanggotaan substantif

Kewarganegaraan sebagai keanggotaan menekankan perbedaan antara individu yang berada di dalam dan di luar masyarakat, serta pentingnya pengakuan dan partisipasi dalam politik. Hal ini karena dalam model Yunani kuno, keanggotaan hanya diperuntukkan bagi elit negara kota, sedangkan dalam model Romawi, hak hukum diberikan tanpa partisipasi politik. Kewargaan dalam keanggotaan menekankan perbedaan antara individu yang berada di dalam atau di luar komunitas, serta pentingnya pengakuan dan juga

partisipasi dalam proses politik untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial. Kewargaan dan kajian kewargaan mutakhir banyak memberi perhatian pada pentingnya konstruksi keanggotaan yang bersifat denasional, transnasional, dan pascanasional.

2) Kewargaan sebagai status legal

Dalam konteks ini, kewargaan memberikan legitimasi hukum kepada individu untuk mengakses hak-hak sipil seperti keamanan, privasi, dan kepemilikan properti. Status legal menjadi penting untuk memastikan bahwa warga negara dapat berpartisipasi dalam proses politik dan sosial tanpa campur tangan yang tidak semestinya dari negara. Heater (1999) mencatat bahwa hukum internasional mengakui hak negara berdaulat untuk mendefinisikan warga negara berdasarkan kewargaan orangtua (*ius sanguinis*), asal negara tempat dilahirkan (*ius soli*), proses pernikahan seorang warga negara (*ius matrimonii*), atau sebab telah tinggal disuatu teritori dalam periode tertentu (*ius domicili*). Selanjutnya lahirlah kewargaan berbasis fakta sosial (*ius nexi*) yang sangat relevan bagi orang-orang yang berada dalam situasi antara non warga negara dan warga negara penuh.

3) Kewargaan sebagai kerangka hak

Kewargaan sebagai hak mencakup serangkaian hak yang terkait dengan status keanggotaan dan

kewargaan yang saling berhubungan. Hak-hak ini mencakup tiga tipologi hak yang diinisiasi oleh Marshall (1992): hak sipil, politik, dan sosial. Hak-hak sipil merupakan hak yang melindungi keamanan dan privasi individu termasuk dalam mengakses keadilan dan representasi legal. Hak-hak politik berkaitan dengan partisipasi dalam panggung politik dan arena publik. Hak-hak sosial meliputi hak akses ke layanan sosial, partisipasi dalam proses sosial, dan segala hal yang berorientasi pada kesejahteraan. Dengan demikian, kewargaan sebagai hak menekankan pentingnya mengakui dan melindungi hak-hak individu yang telah menjadi bagian dari komunitas sehingga mereka dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial dan politik.

4) Kewargaan sebagai partisipasi

Kewargaan memiliki kaitan intrinsik dengan politik dan teori demokrasi, dengan perbedaan antara partisipasi langsung dan representasi tidak langsung sebagai cara menjamin kontrol politik warga negara (Stokke, 2018). Dalam dimensi ini, Stokke (2018) menekankan pentingnya keterlibatan individu dalam kehidupan sosial dan politik. Partisipasi ini mencakup kewajiban untuk berkontribusi pada masyarakat seperti membayar pajak dan terlibat dalam proses pengambilan

keputusan. Janoski dan Gran (2002) menstratifikasi tiga bentuk konsep diri warga negara berdasarkan praktik politiknya; *warga negara partisipan*, *warga negara nonpartisipan*, dan *warga negara oportunistis*. Ini semua bermakna bahwa partisipasi adalah bagian kunci dalam politik kewargaan dan memerlukan perhatian analitis dan kontekstual pada ruang-ruang politik.

c. Implementasi Teori Politik Kewargaan Kristian Stokke dalam Penelitian ini

Berdasarkan hasil kajian awal, implementasi konsep politik kewargaan dalam konteks masyarakat Sayung dapat dijelaskan melalui tiga dimensi utama berikut:

a. Kewargaan sebagai Klaim Hak

Masyarakat Sayung mengalami kerentanan akibat banjir rob, yang menyebabkan terganggunya akses terhadap air bersih, sanitasi, tempat tinggal yang layak, dan pekerjaan. Dalam situasi ini, masyarakat melakukan klaim terhadap negara untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka. Tuntutan warga akan penyediaan air bersih oleh BPBD dan PDAM, pembangunan tanggul, serta rehabilitasi jalan adalah bentuk nyata dari kewargaan sebagai klaim.

b. Kewargaan sebagai Praktik Politik

Masyarakat tidak hanya mengeluh secara pasif, tetapi aktif melakukan berbagai bentuk perjuangan politik, seperti: menyampaikan proposal pembangunan kepada

pemerintah desa/kabupaten, mengorganisasi aksi demonstrasi menuntut perbaikan infrastruktur, memviralkan kondisi rob melalui media sosial untuk menarik perhatian publik dan pemerintah, mengorganisasi komunitas warga dan bekerja sama dengan organisasi keagamaan seperti NU untuk memperjuangkan pemenuhan hak.

Hal ini menunjukkan bahwa warga telah menjadi aktor politik yang sadar akan hak-haknya dan bersedia memperjuangkannya melalui berbagai bentuk tindakan kolektif.

c. Kewargaan sebagai Relasi Kuasa

Relasi antara warga Sayung dan Pemerintah Kabupaten Demak memperlihatkan dinamika relasi kuasa. Ketika negara gagal atau lamban dalam memenuhi hak warga, muncullah relasi kuasa yang bersifat kontestatif. Warga mulai mempertanyakan legitimasi negara dalam menjamin perlindungan dan pelayanan. Ini memperlihatkan transformasi relasi negara-warga dari yang bersifat hierarkis menjadi lebih horizontal dan dinamis.

d. Integrasi dengan Pendekatan Fenomenologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang menekankan pada pengalaman subjektif warga dalam menghadapi banjir rob. Dengan mengintegrasikan teori politik

kewargaan Kristian Stokke, pengalaman tersebut dianalisis sebagai pengalaman politik: bahwa penderitaan warga bukan hanya aspek ekologis, namun juga merupakan kegagalan negara dalam memenuhi hak dasar. Narasi warga menjadi penting sebagai sumber legitimasi tuntutan atas hak, sekaligus sebagai bentuk resistensi terhadap ketimpangan kuasa.

e. Kontribusi Teoretik

Implementasi teori politik kewargaan dari Kristian Stokke dalam penelitian ini memberikan kontribusi pada dua hal: Perluasan kajian politik kewargaan ke dalam isu lingkungan dan bencana, khususnya dalam konteks pesisir dan perubahan iklim serta penguatan pemahaman bahwa hak atas lingkungan yang layak dan perlindungan dari bencana adalah bagian dari hak kewargaan, yang tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab negara.

Dengan demikian, teori ini tidak hanya menjelaskan bagaimana masyarakat beradaptasi, tetapi juga bagaimana mereka berjuang dan berpolitik untuk hak hidup yang layak di tengah krisis lingkungan yang terus memburuk.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang harus dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Atau

pun, metode penelitian ini adalah sebuah bagian penting pada saat menyusun sebuah tulisan ilmiah, dimana biasanya pembahasan metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dankegunaan tertentu. Adapun menurut para ahli pengertian metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan di temukan pengetahuan teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia (Sugiyono, 2019).

H. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan dan pendekatan fenomenologi. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan sejumlah individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan mengapa menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman peneliti dimana metode ini dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan suatu yang sulit untuk dipahami (Creswell, 2013). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, peneliti akan mengeksplorasi bagaimana hak dasar masyarakat

(seperti hak atas tempat tinggal, kesehatan, air bersih, pendidikan, dan pekerjaan) dipenuhi dalam kondisi terdampak banjir rob.

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek dengan tujuan mendapatkan data lapangan yang lengkap serta jelas. Dalam kajian penelitian ini, studi lapangan akan fokus pada pemahaman mendalam mengenai bagaimana masyarakat Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, beradaptasi dengan bencana banjir rob serta bagaimana respon pemerintah setempat dalam menghadapinya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Studi fenomenologi adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana individu merasakan, menginterpretasikan, dan memberi makna terhadap pengalaman tertentu dalam hidup mereka. Dalam konteks penelitian ini, fenomenologi akan digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana masyarakat Kecamatan Sayung menghadapi banjir rob, dan bagaimana mereka mendefinisikan serta menanggapi kondisi tersebut.

I. Sumber Data

Pada penelitian ini, terdapat dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang memberikan informasi secara langsung (Sugiyono, 2019). Data primer ini adalah data yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian, didapatkan langsung dari lokasi objek penelitian atau dikumpulkan langsung di lapangan. Sumber utama data primer meliputi observasi, wawancara mendalam

baik lisan ataupun tulisan secara langsung terhadap informan utama, dokumentasi, dan teori. Subjek utama penelitian ini adalah Warga terdampak banjir rob di Kecamatan Sayung. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung (Sugiyono, 2019). Sumber data sekunder didapat dari mengumpulkan laporan dokumen pendukung catatan terdahulu, dokumentasi, buku, jurnal, maupun skripsi terdahulu yang berkesinambungan dengan konteks kajian penelitian yang dilakukan saat ini.

a. Data primer

Data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari subjek penelitian menggunakan instrumen tertentu berupa wawancara, observasi langsung, kuesioner, atau metode lainnya yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya. Data primer memiliki beberapa keunggulan yakni, akurasi, keabsahan, detail, dan konteks yang kaya (Indrianto & Supomo, 2010). Data penelitian akan diperoleh dari hasil proses wawancara dan pengamatan secara langsung dan mendalam di lapangan dengan menelusuri melalui responden. Penelitian ini nantinya akan memperoleh sumber data dari hasil wawancara informan atau narasumber dan observasi yang dilakukan di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

b. Data Sekunder adalah

Sumber data yang tidak langsung diterima oleh pengumpul data, bisa melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi

melengkapi data yang diperlukan data primer (Sugiyono, 2019). Menurut Hardani (2020) mengungkapkan bahwa data sekunder ialah data yang diperoleh secara tidak langsung baik dari buku, berupa laporan atau pustaka.

J. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara (interview), observasi lapangan (pengamatan), dan dokumentasi. Jenis-jenis data tersebut akan digambarkan sebagai berikut:

a) Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai jenis penelitian. Dalam wawancara, dua orang atau lebih terlibat dalam proses interaktif untuk bertukar informasi, pandangan, dan pengalaman terkait dengan subjek tertentu. Tujuan utama dari wawancara untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang suatu peristiwa, individu, aktivitas, organisasi, motivasi, emosi, atau topik lainnya yang sedang diteliti.

Wawancara dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari wawancara terstruktur yang mengikuti daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, hingga wawancara tak terstruktur yang lebih bebas dan mengikuti alur percakapan yang berkembang secara alami. Jenis wawancara yang digunakan biasanya bergantung pada tujuan penelitian,

kompleksitas topik, dan preferensi peneliti. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara terstruktur untuk mendapatkan sudut pandang yang mendalam tentang perjuangan. Wawancara terstruktur adalah wawancara di mana pewawancara mempraktikkan pertanyaan-pertanyaan yang harus dia tanyakan dan menghasilkan jawaban hipotetis. Itu sebabnya pertanyaan-pertanyaannya disusun dengan cermat. Wawancara jenis ini digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih rinci dari informan. Penulis akan melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman masyarakat terdampak banjir dan upaya pemenuhan hak mereka.

b) Observasi

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat pokok-pokok informasi sesuai dengan apa yang diperolehnya selama penelitian. Pengamatan ini melibatkan dua komponen yakni, pengamat dan objek yang diamati. Dalam penelitian ini, peneliti akan secara langsung terjun atau melibatkan diri untuk melihat aktivitas masyarakat serta perjuangan masyarakat saat terjadi banjir rob ataupun sedang tidak terjadi banjir rob.

Observasi akan dilakukan di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, untuk menggali bentuk adaptasi masyarakat dalam menghadapi banjir rob serta respon pemerintah terhadap fenomena tersebut. Proses observasi dilakukan dengan

pendekatan fenomenologi untuk memahami pengalaman subyektif masyarakat yang terkena dampak banjir rob. Dalam penelitian ini, peneliti akan secara langsung mengamati kondisi di lapangan, mencatat perubahan yang terjadi, serta berinteraksi dengan masyarakat terdampak untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai pemenuhan hak dasar mereka secara masif.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang sudah ada. Namun tidak semua dokumen memilih tingkat kredibilitas yang tinggi. Sebagai contoh banyak foto yang tidak mencerminkan keadaan aslinya, karena foto bisa saja dibuat untuk kepentingan tertentu (Sugiyono, 2019).

Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan berupa dokumen kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Demak terkait penanganan banjir rob, peraturan perundang-undangan terkait pemenuhan hak dasar masyarakat terdampak bencana, laporan hasil penelitian atau kajian akademik yang membahas banjir rob di Sayung, dan berita dari media massa dan laporan terkait bantuan dan kebijakan penanganan banjir rob.

K. Teknik Analisis Data

Proses analisis data melibatkan usaha untuk menyusun dan mengorganisir catatan dari hasil wawancara, observasi, dan sumber lainnya secara sistematis, dengan tujuan untuk memperluas pemahaman tentang objek penelitian yang sedang diteliti (Muhadjir, 1998). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data induktif yaitu hasil analisa berdasarkan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi kesimpulan secara umum. Menurut Huberman & Miles (1984) analisis data terdiri dari tiga kegiatan, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses analisis yang mengarahkan untuk mengeliminasi informasi yang tidak relevan dan mengorganisir data dengan cara yang memungkinkan penarikan kesimpulan yang akurat. Terdapat dua jenis proses dalam reduksi data, yaitu *living in* yang merujuk pada data yang digunakan, dan *living out* yang merujuk pada data yang tidak digunakan. Semua data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dikategorikan, ditajamkan, dan dibuang pada bagian yang tidak dibutuhkan sehingga bisa disusun dan ditarik kesimpulan.

b. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk menyusun informasi yang telah dikumpulkan selama penelitian lapangan sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data akan menggunakan berbagai format yang sesuai dengan karakteristik etnografi yang kaya dan

mendalam, seperti narasi deskriptif. Penyajian data visual seperti foto, sketsa, atau peta akan digunakan untuk memberi gambaran konkrit tentang kondisi fisik Kecamatan Sayung, aktivitas warga terdampak banjir rob.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahapan terakhir dalam suatu penelitian kualitatif. Temuan yang ditemukan dalam penelitian menentukan pentingnya penelitian dan mencakup hasil analisis yang telah diinterpretasi. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari penelitian yang mengatasi masalah penelitian secara teoritis maupun empiris. Validitas kesimpulan akan diperkuat melalui triangulasi data dari berbagai sumber dan metode. Kesimpulan ditarik berdasarkan hasil analisis dampak banjir rob terhadap akses layanan dasar serta evaluasi terhadap peran pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut. Temuan penelitian akan digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam mitigasi dan adaptasi terhadap banjir rob di Kecamatan Sayung.

L. Sistematika Penulisan

Sistematika berfungsi untuk memberikan gambaran secara garis besar yang tercakup dalam tujuh bab, yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, manfaat, tinjauan pustaka, serta metode penelitian sebagai penjelasan secara konkrit yang akan dikaji oleh peneliti dan disampaikan kepada pembaca.

BAB II TEORI POLITIK KEWARGAAN KRISTIAN STOKKE

Bab ini berisi tentang penjelasan mendalam tentang teori fungsionalisme struktural, asumsi dasar teori, serta bagaimana konsep dasar teori tersebut dipahami untuk menganalisis data-data yang sudah diperoleh peneliti. Bab ini juga akan memuat tentang implementasi studi fenomenologi dalam penelitian ini.

BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN SAYUNG

Bab ini menggambarkan secara umum tentang kondisi geografis, demografis, topografis, dan sejarah Kecamatan Sayung dari waktu ke-waktu.

BAB IV PERJUANGAN MASYARAKAT TERDAMPAK DALAM MENUNTUT HAK KEWARGAAN

Bab ini membahas seperti apa bentuk perjuangan yang dilakukan masyarakat untuk menuntut hak-hak dasar mereka sebagai warga negara.

BAB V LATAR BELAKANG PERJUANGAN MASYARAKAT TERDAMPAK DALAM MEMPERJUANGKAN HAK KEWARGAANNYA

Bab ini membahas apa yang melatarbelakangi perjuangan masyarakat sayung dalam memperjuangkan hak kewargaannya.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan yang akan menjadi jawaban dari rumusan masalah beserta saran sebagai bentuk solusi dan pandangan.

DAFTAR PUSTAKA

Bab ini mencantumkan berbagai daftar referensi pendukung dalam penyusunan hasil penelitian.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Penjelasan Konsep

1. Konsep Dasar Politik dan Hak-Hak Kewargaan

Istilah 'politik' berasal dari bahasa Yunani 'polis', yang berarti kota atau negara-kota, dan 'politikos', yang mengacu pada segala sesuatu yang berhubungan dengan warga negara. Dalam pengertian modern, politik tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan publik, tetapi juga dengan proses-proses sosial yang menentukan bagaimana sumber daya dialokasikan, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana hubungan antara negara dan masyarakat terbentuk. Politik juga mencakup mekanisme kontrol, partisipasi, dan representasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Crick, 2005).

Dalam kerangka negara modern, salah satu fondasi utama politik adalah hak-hak kewargaan (*citizenship rights*). Kewargaan, dalam pengertian yang luas, tidak hanya menunjuk pada status legal sebagai anggota suatu negara, tetapi juga merujuk pada hubungan yang dinamis antara individu dan negara, yang diatur melalui seperangkat hak dan kewajiban. T.H. Marshall (1950) dalam karya klasiknya mengklasifikasikan hak-hak kewargaan ke dalam tiga kategori besar: hak sipil, hak politik, dan hak sosial.

Pertama, hak sipil (*civil rights*) mencakup hak-hak dasar individu yang memberikan perlindungan terhadap kebebasan pribadi. Ini meliputi kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas keadilan, dan perlindungan hukum. Kedua, hak politik (*political rights*) mencakup hak warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, seperti memilih, dipilih, dan terlibat dalam aktivitas politik. Ketiga, hak sosial (*social rights*) menyangkut hak atas kesejahteraan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta standar hidup yang layak.

Dalam konteks masyarakat yang terdampak oleh bencana ekologis seperti banjir rob, hak-hak ini sering kali terabaikan. Misalnya, ketika akses terhadap infrastruktur, layanan publik, atau perlindungan lingkungan tidak terpenuhi secara adil dan merata, maka negara dianggap gagal dalam menjamin hak-hak sipil dan sosial warganya. Oleh karena itu, studi tentang adaptasi masyarakat terhadap banjir rob tidak dapat dilepaskan dari analisis terhadap bagaimana negara memenuhi atau mengabaikan hak-hak kewargaan tersebut.

2. Politik Kewargaan: Konsep dan Perkembangannya

Politik kewargaan (*citizenship politics*) merupakan konsep yang berkembang dari pemikiran tentang hak-hak kewargaan menuju pada pemahaman yang lebih aktif tentang bagaimana warga negara memperjuangkan hak-haknya dalam relasi dengan negara. Tidak semua hak kewargaan secara otomatis diberikan oleh negara; sering kali warga negara harus memperjuangkannya

melalui proses politik yang kompleks, baik melalui jalur institusional maupun aksi kolektif di ruang publik.

Dalam kajian Isin dan Turner (2002), kewargaan dipahami sebagai praktik sosial dan politik yang terus dinegosiasikan. Warga negara bukan hanya penerima pasif kebijakan negara, tetapi juga agen aktif yang terlibat dalam produksi, reproduksi, dan transformasi norma-norma kewargaan. Politik kewargaan melibatkan berbagai bentuk perjuangan sosial yang bertujuan untuk mengakses hak, mendapatkan pengakuan, serta memperjuangkan keadilan sosial dan ekologis.

Dalam konteks bencana, seperti banjir rob di wilayah pesisir, politik kewargaan menjadi penting karena memperlihatkan bagaimana masyarakat berupaya memperjuangkan haknya atas lingkungan yang aman, akses terhadap infrastruktur, serta tanggapan cepat dari pemerintah daerah. Ketika respons pemerintah dinilai lamban atau tidak memadai, masyarakat terdampak sering kali membentuk forum warga, melakukan aksi protes, hingga menggandeng organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat suara mereka dalam sistem politik lokal.

Berikut adalah penjelasan politik kewargaan menurut para ahli:

1. Bryan S. Turner

Turner (1993) menjelaskan politik kewargaan sebagai arena konflik dan negosiasi antara warga negara dan negara

mengenai hak-hak sosial, sipil, dan politik. Baginya, kewargaan bukan hanya status hukum, tetapi juga praktik sosial dan politik yang memungkinkan individu menuntut hak dan menjalankan kewajiban.

2. T.H. Marshall

Marshall (1950) adalah tokoh awal yang mengklasifikasikan kewargaan dalam tiga dimensi:

- 1) Hak Sipil: kebebasan individu, hak atas keadilan.
- 2) Hak Politik: hak memilih dan dipilih, serta berpartisipasi dalam pemerintahan.
- 3) Hak Sosial: hak atas kesejahteraan dan standar hidup layak.

Politik kewargaan menurut Marshall adalah bagaimana masyarakat memperjuangkan ketiga dimensi tersebut agar diakui dan dipenuhi oleh negara.

3. Will Kymlicka

Kymlicka (1995) menyoroti politik kewargaan dari perspektif multikulturalisme. Ia berpendapat bahwa negara harus mengakui perbedaan identitas etnis, budaya, dan agama dalam kebijakan kewargaan. Menurutnya, politik kewargaan harus inklusif terhadap kelompok minoritas.

4. Engin F. Isin

Isin (2002) melihat kewargaan sebagai praktik aktif (*acts of citizenship*). Menurutnya, warga negara bukan hanya penerima hak, tetapi juga agen yang menciptakan hak melalui

aksi kolektif, seperti demonstrasi, advokasi, dan gugatan hukum.

5. Kristian Stokke

Menurut Kristian Stokke (2017), politik kewargaan adalah strategi warga negara untuk mengklaim hak-haknya melalui keterlibatan politik dan mobilisasi kolektif, terutama di wilayah yang mengalami marginalisasi oleh negara. Stokke menekankan bahwa kewargaan bukanlah hal yang pasif dan statis, tetapi merupakan proses kontestasi dan perjuangan untuk pengakuan dan pemenuhan hak.

Ia menyebut bahwa politik kewargaan tumbuh dari bawah (*bottom-up*), melalui prakarsa masyarakat sipil, organisasi lokal, dan gerakan sosial yang mendesak negara untuk bertanggung jawab.

Dari berbagai pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa *politik kewargaan adalah proses dinamis di mana warga negara memperjuangkan hak-haknya, baik secara formal melalui mekanisme hukum dan pemilu, maupun secara informal melalui aksi-aksi kolektif. Para ahli sepakat bahwa kewargaan tidak hanya soal status, tetapi juga soal praktik sosial dan politik* untuk membangun keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat.

3. Teori Politik Kewargaan Kristian Stokke

a. Konsep Politik Kewargaan Kristian Stokke

Kristian Stokke merupakan salah satu pemikir kontemporer yang menekankan pentingnya memandang

kewargaan tidak hanya sebagai status legal atau administratif, tetapi sebagai proses sosial dan politik yang mencerminkan perjuangan warga negara untuk mengklaim hak-haknya. Dalam karyanya, Stokke (2009, 2017) memperkenalkan konsep '*claim-making practices*', yaitu praktik pengajuan klaim oleh warga negara terhadap negara terkait pemenuhan hak-hak dasar.

Menurut Stokke, politik kewargaan muncul dalam konteks di mana negara tidak sepenuhnya hadir atau responsif terhadap kebutuhan warganya, terutama di negara-negara berkembang. Dalam situasi tersebut, warga negara membentuk praktik kewargaan melalui mobilisasi sosial, advokasi hak, dan interaksi politik yang bersifat informal maupun formal. Praktik-praktik ini dapat berbentuk demonstrasi, pengajuan proposal pembangunan, kampanye media sosial, hingga kolaborasi dengan LSM atau organisasi berbasis komunitas.

Stokke menekankan bahwa politik kewargaan sangat penting dalam menghadapi marginalisasi struktural, di mana kelompok tertentu tidak memperoleh akses yang adil terhadap layanan publik, perlindungan hukum, atau infrastruktur dasar. Dalam konteks Kecamatan Sayung, politik kewargaan menjadi kerangka yang relevan untuk memahami bagaimana masyarakat yang terdampak banjir rob menyusun strategi adaptasi sembari memperjuangkan

hak-haknya melalui saluran-saluran sosial-politik yang tersedia. Dengan demikian, pendekatan Stokke memperluas pemahaman kita tentang adaptasi masyarakat, bukan hanya sebagai upaya bertahan secara fisik, tetapi juga sebagai proses politik untuk menegosiasikan keberadaan dan keberhakannya di hadapan negara.

Teori politik kewargaan yang dikembangkan oleh Kristian Stokke menawarkan perspektif komprehensif untuk memahami dinamika kewarganegaraan dalam konteks politik kontemporer. Stokke mengadvokasi pemahaman luas tentang kewarganegaraan yang melampaui definisi legal tradisional, menekankan pentingnya memandang kewarganegaraan sebagai konsep multidimensi yang mencakup aspek kultural, yuridis, sosial, dan politik.

b. Asumsi dasar Teori Politik Kewargaan Kristian Stokke

Fondasi utama teori Stokke terletak pada konseptualisasi kewarganegaraan sebagai kerangka kerja untuk menganalisis konflik politik seputar inklusi dan eksklusi. Dalam pandangannya, kewarganegaraan tidak hanya status hukum, tetapi merupakan proses dinamis yang dibentuk oleh relasi kekuasaan kontekstual dan perjuangan politik. Stokke mengidentifikasi empat dimensi kunci kewarganegaraan:

1) Kewargaan sebagai keanggotaan substantif

Kewarganegaraan sebagai keanggotaan menekankan perbedaan antara individu yang berada di dalam dan di luar masyarakat, serta pentingnya pengakuan dan partisipasi dalam politik. Hal ini karena dalam model Yunani kuno, keanggotaan hanya diperuntukkan bagi elit negara kota, sedangkan dalam model Romawi, hak hukum diberikan tanpa partisipasi politik. Kewargaan dalam keanggotaan menekankan perbedaan antara individu yang berada di dalam atau di luar komunitas, serta pentingnya pengakuan dan juga partisipasi dalam proses politik untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial. Kewargaan dan kajian kewargaan mutakhir banyak memberi perhatian pada pentingnya konstruksi keanggotaan yang bersifat denasional, transnasional, dan pascanasional.

2) Kewargaan sebagai status legal

Dalam konteks ini, kewargaan memberikan legitimasi hukum kepada individu untuk mengakses hak-hak sipil seperti keamanan, privasi, dan kepemilikan properti. Status legal menjadi penting untuk memastikan bahwa warga negara dapat berpartisipasi dalam proses politik dan sosial tanpa campur tangan yang tidak semestinya dari negara. Heater (1999) mencatat bahwa hukum internasional

mengakui hak negara berdaulat untuk mendefinisikan warga negara berdasarkan kewargaan orangtua (*ius sanguinis*), asal negara tempat dilahirkan (*ius soli*), proses pernikahan seorang warga negara (*ius matrimonii*), atau sebab telah tinggal disuatu teritori dalam periode tertentu (*ius domicili*). Selanjutnya lahirilah kewargaan berbasis fakta sosial (*ius nexi*) yang sangat relevan bagi orang-orang yang berada dalam situasi antara non warga negara dan warga negara penuh.

3) Kewargaan sebagai kerangka hak

Kewargaan sebagai hak mencakup serangkaian hak yang terkait dengan status keanggotaan dan kewargaan yang saling berhubungan. Hak-hak ini mencakup tiga tipologi hak yang diinisiasi oleh Marshall (1992): hak sipil, politik, dan sosial. Hak-hak sipil merupakan hak yang melindungi keamanan dan privasi individu termasuk dalam mengakses keadilan dan representasi legal. Hak-hak politik berkaitan dengan partisipasi dalam panggung politik dan arena publik. Hak-hak sosial meliputi hak akses ke layanan sosial, partisipasi dalam proses sosial, dan segala hal yang berorientasi pada kesejahteraan. Dengan demikian, kewargaan sebagai hak menekankan pentingnya mengakui dan melindungi hak-hak individu yang telah menjadi bagian

dari komunitas sehingga mereka dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial dan politik.

4) Kewargaan sebagai partisipasi

Kewargaan memiliki kaitan intrinsik dengan politik dan teori demokrasi, dengan perbedaan antara partisipasi langsung dan representasi tidak langsung sebagai cara menjamin kontrol politik warga negara (Stokke, 2018). Dalam dimensi ini, Stokke (2018) menekankan pentingnya keterlibatan individu dalam kehidupan sosial dan politik. Partisipasi ini mencakup kewajiban untuk berkontribusi pada masyarakat seperti membayar pajak dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Janoski dan Gran (2002) menstratifikasi tiga bentuk konsep diri warga negara berdasarkan praktik politiknya; *warga negara partisipan*, *warga negara nonpartisipan*, dan *warga negara oportunistis*. Ini semua bermakna bahwa partisipasi adalah bagian kunci dalam politik kewargaan dan memerlukan perhatian analitis dan kontekstual pada ruang-ruang politik.

c. Implementasi Teori Politik Kewargaan Kristian Stokke dalam Penelitian ini

Berdasarkan hasil kajian awal, implementasi konsep politik kewargaan dalam konteks masyarakat Sayung dapat dijelaskan melalui tiga dimensi utama berikut:

1) Kewargaan sebagai Klaim Hak

Masyarakat Sayung mengalami kerentanan akibat banjir rob, yang menyebabkan terganggunya akses terhadap air bersih, sanitasi, tempat tinggal yang layak, dan pekerjaan. Dalam situasi ini, masyarakat melakukan klaim terhadap negara untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka. Tuntutan warga akan penyediaan air bersih oleh BPBD dan PDAM, pembangunan tanggul, serta rehabilitasi jalan adalah bentuk nyata dari kewargaan sebagai klaim.

2) Kewargaan sebagai Praktik Politik

Masyarakat tidak hanya mengeluh secara pasif, tetapi aktif melakukan berbagai bentuk perjuangan politik, seperti: menyampaikan proposal pembangunan kepada pemerintah desa/kabupaten, mengorganisasi aksi demonstrasi menuntut perbaikan infrastruktur, memviralkan kondisi rob melalui media sosial untuk menarik perhatian publik dan pemerintah, mengorganisasi komunitas warga dan bekerja sama dengan organisasi keagamaan seperti NU untuk memperjuangkan pemenuhan hak. Hal ini menunjukkan bahwa warga telah menjadi aktor politik yang sadar akan hak-haknya dan bersedia memperjuangkannya melalui berbagai bentuk tindakan kolektif.

3) Kewargaan sebagai Relasi Kuasa

Relasi antara warga Sayung dan Pemerintah Kabupaten Demak memperlihatkan dinamika relasi kuasa. Ketika negara gagal atau lamban dalam memenuhi hak warga, muncullah relasi kuasa yang bersifat kontestatif. Warga mulai mempertanyakan legitimasi negara dalam menjamin perlindungan dan pelayanan. Ini memperlihatkan transformasi relasi negara-warga dari yang bersifat hierarkis menjadi lebih horizontal dan dinamis.

4. Integrasi dengan Pendekatan Fenomenologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang menekankan pada pengalaman subjektif warga dalam menghadapi banjir rob. Dengan mengintegrasikan teori politik kewargaan Kristian Stokke, pengalaman tersebut dianalisis sebagai pengalaman politik: bahwa penderitaan warga bukan hanya aspek ekologis, namun juga merupakan kegagalan negara dalam memenuhi hak dasar. Narasi warga menjadi penting sebagai sumber legitimasi tuntutan atas hak, sekaligus sebagai bentuk resistensi terhadap ketimpangan kuasa.

5. Kontribusi Teoretik

Implementasi teori politik kewargaan dari Kristian Stokke dalam penelitian ini memberikan kontribusi pada dua hal:

Perluasan kajian politik kewargaan ke dalam isu lingkungan dan bencana, khususnya dalam konteks pesisir dan perubahan iklim serta penguatan pemahaman bahwa hak atas lingkungan yang layak dan perlindungan dari bencana adalah bagian dari hak kewargaan, yang tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab negara. Dengan demikian, teori ini tidak hanya menjelaskan bagaimana masyarakat beradaptasi, tetapi juga bagaimana mereka berjuang dan berpolitik untuk hak hidup yang layak di tengah krisis lingkungan yang terus memburuk.

BAB III

GAMBARAN UMUM

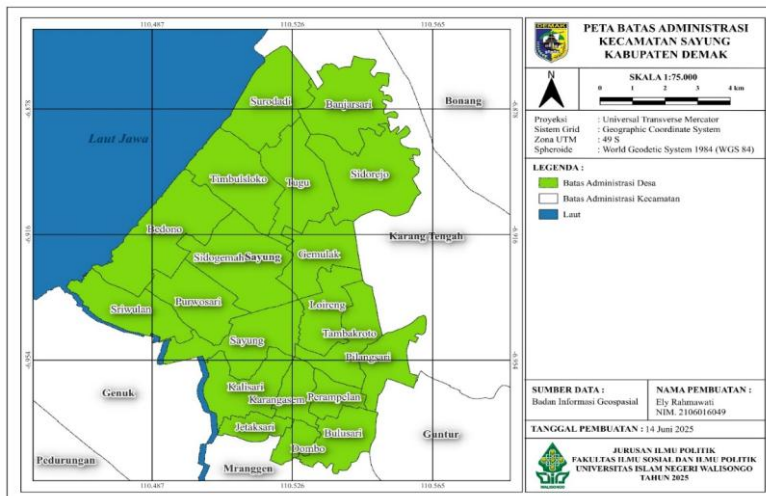
A. Gambaran Umum Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak

1. Kondisi Geografis Kecamatan Sayung

Kecamatan Sayung merupakan salah satu kecamatan yang terletak di bagian utara Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kecamatan Sayung berada pada koordinat antara 6°52'–7°01' Lintang Selatan dan 110°28'–110°34' Bujur Timur. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan wilayah berikut:

- a. Sebelah utara : Laut Jawa
- b. Sebelah selatan : Kecamatan Karangtengah dan Kecamatan Gajah
- c. Sebelah barat : Kota Semarang
- d. Sebelah timur : Kecamatan Karangtengah dan Kecamatan Demak

Luas wilayah Kecamatan Sayung mencapai kurang lebih 63,25 km² dan terdiri dari 19 desa. Wilayah ini memiliki topografi yang relatif datar, dengan ketinggian antara 0–3 meter di atas permukaan laut, sehingga menjadikan sebagian besar wilayahnya rawan terhadap bencana banjir rob.



Gambar 1. Peta Administrasi Kecamatan Sayung

Sumber: Olah Data Peneliti, 2025

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk di Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 108.372 jiwa. Desa Kalisari menjadi desa dengan penduduk tertinggi dengan 12.562 jiwa, dan Surodadi menjadi desa dengan jumlah penduduk terendah dengan 2.930 jiwa.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kecamatan Sayung Tahun 2023

No.	Nama Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Jetaksari	5.683
2.	Dombo	4.002
3.	Bulusari	5.224

4.	Perampelan	4.493
5.	Karangasem	4.873
6.	Kalisari	12.562
7.	Sayung	9.471
8.	Tambakroto	3.700
9.	Plangsari	3.380
10.	Loireng	3.311
11.	Gemulak	4.662
12.	Sidogemah	5.465
13.	Purwosari	5.799
14.	Sriwulan	9.934
15.	Bedono	3.264
16.	Timbulsloko	3.333
17.	Tugu	6.181
18.	Sidorejo	5.566
19.	Banjarsari	4.539
20.	Surodadi	2.930
	Kecamatan Sayung	108.372

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2024

3. Kondisi Sosial-Ekonomi dan Infrastruktur

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Sayung sangat dipengaruhi oleh faktor geografis dan lingkungan. Wilayah pesisir seperti Desa Sriwulan, Bedono,

dan Timbulsloko merupakan daerah yang paling terdampak banjir rob. Dampak dari bencana ini meliputi rusaknya infrastruktur jalan, terganggunya akses air bersih, menurunnya kualitas sanitasi, serta terbatasnya layanan kesehatan.

Sebagai wilayah penyangga industri antara Kabupaten Demak dan Kota Semarang, Kecamatan Sayung memiliki banyak kawasan industri dan pabrik, yang turut mempengaruhi dinamika sosial-ekonomi masyarakat. Meski demikian, keberadaan banjir rob yang berlangsung hampir permanen menjadi tantangan utama dalam pembangunan wilayah ini secara berkelanjutan.

Tabel 2. Banyaknya Desa yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Sayung 2021-2023

Jenis Sarana Kesehatan	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah Sakit	-	-	-
Rumah Sakit Bersalin	-	-	-
Poliklinik/Balai Pengobatan	4	3	3
Puskesmas Rawat Inap	1	1	1
Apotek	7	7	7

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2024

Tabel 3. Banyaknya Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Sayung 2021-2023

Tingkat Pendidikan	Negara	Swasta	Jumlah/Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Taman Kanak-Kanak	-	26	26
Raudhatul Athfal	-	26	26
Sekolah Dasar	34	2	36
Madrasah Ibtidaiyah	-	16	16
Sekolah Menengah Pertama	3	5	8
Madrasah Tsanawiyah	-	10	10
Sekolah Menengah Atas	1	1	2
Sekolah Menengah Kejurun	1	3	4
Madrasah Aliyah	-	8	8

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2024

4. Permasalahan Lingkungan: Banjir Rob

Banjir rob telah menjadi permasalahan kronis di Kecamatan Sayung selama lebih dari satu dekade. Intrusi air laut dan penurunan muka tanah menyebabkan beberapa wilayah tergenang secara permanen, sehingga banyak rumah penduduk, sekolah, fasilitas umum, dan lahan produktif menjadi rusak atau hilang. Fenomena ini berdampak besar terhadap kondisi sosial

masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan hak dasar seperti tempat tinggal layak, air bersih, sanitasi, pendidikan, dan kesehatan. Masyarakat di beberapa desa seperti Sidogemah, Gemulak, dan Sriwulan bahkan telah melakukan berbagai bentuk adaptasi, mulai dari meninggikan rumah, membuat jembatan penghubung dari bambu, hingga pindah tempat tinggal secara mandiri. Namun, adaptasi ini belum sepenuhnya didukung oleh kebijakan pemerintah yang sistematis dan berkelanjutan.

5. Sejarah Kecamatan Sayung

Kecamatan Sayung merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki nilai historis, geografis, dan kultural yang penting, khususnya dalam konteks perkembangan masyarakat pesisir utara Pulau Jawa. Secara historis, kawasan ini diperkirakan telah dihuni sejak masa sebelum terbentuknya Kesultanan Demak dan berkembang seiring dengan dinamika sosial dan politik pada masa penyebaran Islam di Jawa.

Penamaan "Sayung" sendiri memiliki akar etimologis yang erat kaitannya dengan kondisi geografis wilayah tersebut. Menurut penuturan masyarakat setempat dan tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun, nama "Sayung" berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu "*saya*" yang berarti "banyak" dan "*ayung-ayung*" atau "*iyung*" yang berarti "gelombang" atau "ombak". Gabungan kedua kata ini

mencerminkan kondisi wilayah pesisir yang kerap diterjang pasang air laut atau banjir rob. Nama ini dianggap merepresentasikan karakteristik fisik daerah tersebut sebagai wilayah pesisir yang rentan terhadap perubahan ekologis, khususnya yang berkaitan dengan dinamika laut dan daratan.

Dalam catatan sejarah yang lebih luas, wilayah Sayung memiliki kaitan erat dengan perkembangan Kesultanan Demak, yang berdiri pada awal abad ke-16 sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Sebagai daerah yang berada di jalur perdagangan pantura, Sayung diperkirakan berperan sebagai simpul penting dalam distribusi barang dan penyebaran ajaran Islam. Meski belum ditemukan sumber tertulis yang secara eksplisit menyebut peran Sayung dalam struktur pemerintahan Kesultanan Demak, letaknya yang strategis di antara pelabuhan-pelabuhan besar seperti Jepara dan Semarang menjadikannya bagian integral dari kawasan pesisir yang berkembang secara ekonomi dan budaya pada masa itu.

Seiring dengan perkembangan zaman, struktur administratif Kecamatan Sayung mulai terbentuk seiring dengan kebijakan kolonial Belanda yang menerapkan sistem pemerintahan lokal (*inlandse bestuur*). Setelah masa kemerdekaan, wilayah ini secara resmi ditetapkan sebagai bagian dari Kabupaten Demak dan mengalami reorganisasi administratif seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Saat ini, Kecamatan Sayung terdiri dari 19 desa dan terus mengalami

perubahan, baik dari sisi struktur sosial, kependudukan, maupun ekologi.

Secara sosiokultural, masyarakat Sayung dikenal sebagai masyarakat agraris-maritim yang menggantungkan hidup dari pertanian, perikanan, dan petambakan. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, kawasan ini mengalami tekanan ekologis yang cukup serius akibat abrasi pantai, penurunan muka tanah (*land subsidence*), serta banjir rob yang berkepanjangan. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik wilayah, tetapi juga turut memengaruhi struktur sosial ekonomi masyarakat, termasuk pola migrasi, pergeseran mata pencaharian, dan transformasi identitas sosial.

Meskipun sejarah tertulis tentang Kecamatan Sayung masih terbatas dan banyak bergantung pada sumber lisan, nilai-nilai historis dan kultural yang terkandung di dalamnya tetap menjadi bagian penting dalam memahami dinamika masyarakat pesisir utara Jawa. Oleh karena itu, kajian terhadap wilayah ini tidak hanya penting dalam konteks geografi dan administrasi, tetapi juga dalam kerangka analisis sosial dan budaya yang lebih luas.

6. Visi dan Misi Kecamatan Sayung

Visi Kecamatan Sayung mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Demak, yaitu: *Demak Semakin Bermartabat, Maju, dan Sejahtera.*"

Visi ini mencerminkan tujuan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, kemajuan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang bermartabat.

Misi yang mendukung visi tersebut antara lain:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak.
2. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal seperti perikanan dan UMKM.
4. Membangun infrastruktur yang mendukung kesejahteraan dan aksesibilitas masyarakat.
5. Menjaga kelestarian lingkungan dan memperkuat ketahanan sosial, khususnya dalam menghadapi bencana seperti banjir rob.

Kecamatan Sayung menerapkan visi dan misi ini melalui berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir yang rentan terhadap perubahan lingkungan.

B. Gambaran Umum Bencana Rob Kecamatan Sayung

Banjir rob merupakan fenomena banjir yang disebabkan oleh naiknya permukaan air laut ke daratan, terutama di wilayah pesisir. Di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, banjir rob telah menjadi bencana ekologis yang terjadi secara kronis dan berdampak luas

terhadap kehidupan masyarakat. Fenomena ini bukan semata-mata akibat faktor alamiah, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor antropogenik (buatan manusia). Adapun penyebab utama banjir rob di wilayah ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penurunan Muka Tanah (*Land Subsidence*)

Salah satu penyebab dominan banjir rob di Sayung adalah terjadinya penurunan muka tanah secara signifikan, yang dalam beberapa dekade terakhir mencapai laju sekitar 10–15 cm per tahun. Penurunan ini disebabkan oleh eksploitasi air tanah secara berlebihan, terutama untuk keperluan industri dan rumah tangga. Ketika air tanah disedot terus-menerus tanpa kontrol yang memadai, struktur tanah menjadi kosong dan tidak mampu menopang permukaan, sehingga tanah perlahan-lahan turun.

2. Kenaikan Muka Air Laur (*Land Sea Level*)

Secara global, perubahan iklim telah memicu kenaikan permukaan air laut akibat mencairnya es kutub dan pemanasan air laut. Di kawasan pesisir utara Jawa, termasuk Demak, kenaikan ini berkisar antara 6–10 mm per tahun. Meskipun terlihat kecil, dalam jangka panjang hal ini berkontribusi besar terhadap kerentanan kawasan pesisir terhadap genangan air laut secara permanen.

3. Degradasi Ekosistem Pesisir

Penggundulan hutan mangrove di sepanjang garis pantai Sayung juga turut memperparah banjir rob. Mangrove berfungsi sebagai penahan alami gelombang laut dan abrasi. Hilangnya

vegetasi ini menyebabkan garis pantai semakin terbuka terhadap intrusi air laut, serta mempercepat erosi dan kerusakan garis pantai.

4. Alih Fungsi Lahan dan Tata Ruang yang Tidak Berkelanjutan

Perkembangan kawasan industri dan pemukiman yang tidak terencana dengan baik di wilayah pesisir Sayung telah mengubah kawasan resapan air menjadi area terbangun. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya daya serap tanah terhadap air, sehingga genangan lebih mudah terjadi ketika air laut naik.

5. Kerusakan Infrastruktur Penahan Air

Di beberapa titik, tanggul atau infrastruktur pengendali banjir tidak lagi mampu menahan tekanan air laut yang semakin tinggi, baik karena usia bangunan yang sudah tua, kerusakan teknis, atau karena elevasi tanggul yang tidak memadai terhadap ketinggian permukaan air laut yang terus meningkat.

Secara keseluruhan, banjir rob di Sayung tidak hanya merupakan bencana alam, tetapi juga hasil dari interaksi kompleks antara proses alamiah dan aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan penanggulangan banjir rob di kawasan ini memerlukan integrasi antara strategi teknis (seperti pembangunan tanggul laut), pendekatan ekologis (rehabilitasi mangrove), serta pengaturan ulang kebijakan tata ruang dan pengelolaan sumber daya air tanah.

6. Akibat Terjadinya Bencana Banjir Rob

Banjir rob yang terjadi secara terus-menerus di Kecamatan Sayung telah memberikan dampak multidimensional, baik dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi, hingga infrastruktur. Adapun akibat-akibat dari bencana ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kerusakan Infrastruktur dan Hilangnya Lahan Permukiman

Rob secara berkelanjutan telah merusak berbagai infrastruktur, seperti jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Beberapa desa bahkan telah kehilangan sebagian besar wilayahnya karena tergenang air laut secara permanen. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Demak mencatat bahwa beberapa desa seperti Timbulsloko, Sriwulan, dan Bedono mengalami penyusutan daratan dan relokasi warga secara besar-besaran.

b. Penurunan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Rob menyebabkan konversi lahan produktif menjadi lahan tidak dapat digunakan. Lahan tambak dan sawah yang dulunya menjadi sumber utama penghidupan warga kini tergenang air asin, menyebabkan hasil produksi menurun drastis atau bahkan berhenti total. Hal ini memaksa masyarakat untuk beralih profesi, misalnya menjadi buruh industri di kota-kota terdekat.

c. Gangguan Terhadap Akses Layanan Dasar

Banjir rob menyebabkan rusaknya akses terhadap air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan. Air tanah yang tercemar air laut tidak lagi layak dikonsumsi, sementara sarana sanitasi rusak akibat genangan. Hal ini meningkatkan risiko penyakit seperti diare, penyakit kulit, dan infeksi saluran pernapasan.

d. Munculnya Migrasi Ekologis

Akibat kondisi lingkungan yang tidak lagi layak huni, sebagian masyarakat terpaksa melakukan migrasi atau relokasi ke daerah lain. Fenomena ini dikenal sebagai migrasi ekologis yang menimbulkan tantangan baru, seperti konflik sosial di daerah tujuan, hilangnya identitas lokal, dan ketidakpastian ekonomi.

e. Degradasi Lingkungan dan Ekosistem

Ekosistem pesisir mengalami kerusakan, terutama akibat hilangnya hutan mangrove yang sebelumnya menjadi pelindung alami wilayah pantai. Kerusakan ini memperburuk abrasi dan mempercepat intrusi air laut ke daratan, menciptakan siklus kerusakan lingkungan yang terus berulang.

Bencana rob di Sayung, Demak, bukan hanya menyebabkan kerugian fisik, tetapi juga menciptakan krisis sosial, ekonomi, dan ekologis yang mendalam. Penanganannya harus melibatkan pendekatan terintegrasi antara pemerintah,

masyarakat, dan lembaga lingkungan, dengan memperhatikan aspek adaptasi dan mitigasi jangka panjang.

7. Upaya Adaptasi yang dilakukan oleh Masyarakat terdampak

Banjir rob yang terjadi secara berulang dan dalam jangka waktu yang panjang di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari sosial, ekonomi, hingga lingkungan. Untuk bertahan di tengah kondisi ini, masyarakat setempat melakukan berbagai bentuk adaptasi, baik secara individu maupun kolektif. Adaptasi ini merupakan bentuk respon aktif terhadap tekanan lingkungan dengan tujuan untuk mempertahankan kehidupan, mata pencaharian, dan keberlanjutan komunitas.

1) Adaptasi Fisik

a) Peninggian Jalan

Peninggian jalan pada Kecamatan Sayung yang dilakukan bergantian antar tiap desa, jalanan di desa ditinggikan berkisar 30-75 cm. Salah satu bentuk adaptasi yang dilakukan oleh warga Desa Sriwulan terhadap bencana banjir rob adalah dengan meninggikan akses jalan di lingkungan tempat tinggal mereka. Jalan-jalan yang sebelumnya sering tergenang air kini ditinggikan melalui proses pengecoran, mulai dari jalan masuk desa hingga ke ujung desa yang berbatasan langsung dengan laut. Pengecoran ini juga mencakup gang-gang kecil yang menghubungkan antar

wilayah RT dan RW di desa tersebut. Tinggi jalan yang ditinggikan disesuaikan agar melebihi ketinggian rob yang biasanya melanda, sehingga dapat mencegah genangan air masuk ke jalan. Dengan adanya peninggian jalan ini, warga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa khawatir kendaraan mereka rusak atau mengalami hambatan karena genangan air, serta perjalanan menjadi lebih cepat dan efisien.

Upaya peninggian jalan tersebut dilakukan melalui inisiatif gotong royong warga, dengan cara mengecor jalan menggunakan semen dan pasir yang dikumpulkan dari iuran swadaya atau sumbangan dari tokoh masyarakat setempat. Proses pengecoran dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan masyarakat dan ketinggian rob yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Sunaryo selaku warga desa Sriwulan mengungkapkan bahwa bantuan dari pemerintah dalam program peninggian jalan ini masih tergolong minim dan belum merata. Pemerintah desa dan kabupaten memang pernah melakukan perbaikan pada jalan utama, namun jalan-jalan kecil atau gang-gang pemukiman belum seluruhnya tersentuh program pembangunan. Beberapa warga menyebut bahwa prioritas pemerintah lebih

banyak difokuskan pada pembangunan tanggul dan jalan utama, sementara jalan lingkungan hanya diintervensi bila ada program padat karya tunai atau bantuan dari Dana Desa, itupun dengan anggaran terbatas.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa masyarakat Desa Sriwulan lebih banyak mengandalkan kekuatan kolektif sendiri dalam menjaga aksesibilitas wilayah mereka. Peninggian jalan menjadi langkah penting agar aktivitas ekonomi dan sosial dapat terus berjalan tanpa terganggu oleh rob. Jalan yang lebih tinggi juga mempermudah anak-anak untuk pergi ke sekolah, warga untuk berangkat kerja, serta distribusi logistik dan bantuan saat bencana.



Gambar 2. Kondisi Jalan di Desa Sriwulan

Sumber: Dokumen pribadi tahun 2025

Tindakan kolektif warga Desa Sriwulan dalam memperbaiki infrastruktur jalan secara mandiri mencerminkan bentuk kewargaan yang partisipatoris dan aktif. Mereka tidak hanya pasif menunggu bantuan dari negara, namun secara proaktif membangun ruang hidup yang lebih aman dan fungsional bagi komunitas mereka. Praktik ini juga memperlihatkan munculnya ruang politik baru di luar lembaga formal, di mana warga menjadi aktor utama dalam pengelolaan risiko bencana dan perbaikan kualitas hidup.

Namun demikian, upaya warga ini juga menjadi indikator adanya kesenjangan dalam distribusi keadilan sosial dan pelayanan negara. Ketika warga harus menanggung beban pembangunan infrastruktur dasar secara mandiri, hal ini menunjukkan lemahnya realisasi prinsip kewargaan substantif, yaitu jaminan negara terhadap hak-hak dasar warganya. Oleh karena itu, meskipun praktik ini patut diapresiasi sebagai bentuk ketangguhan masyarakat, tetap dibutuhkan keberpihakan negara dalam bentuk dukungan kebijakan dan anggaran yang adil dan berpihak pada kelompok rentan di wilayah pesisir.

b) Renovasi Rumah

Sebagai bentuk adaptasi terhadap banjir rob yang rutin menggenangi permukiman, warga Desa Sriwulan

melakukan peninggian pondasi rumah secara sederhana. Upaya ini dilakukan dengan cara menimbun lantai rumah yang terendam menggunakan material seperti tanah, batu, atau campuran keduanya yang dikemas dalam karung. Karung-karung ini disusun di dasar lantai sebagai pijakan darurat agar penghuni rumah tidak langsung bersentuhan dengan genangan air rob.

Namun, peninggian lantai rumah tidak selalu diikuti dengan peninggian struktur atap rumah. Keterbatasan ekonomi menjadi kendala utama bagi sebagian besar keluarga untuk melakukan renovasi menyeluruh. Akibatnya, meskipun lantai rumah ditinggikan, jarak antara lantai dan atap menjadi sangat sempit, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam beraktivitas di dalam rumah. Rumah-rumah tersebut, jika dilihat dari luar, tampak sangat rendah dan seolah “terpendam”, namun tetap ditinggali karena warga tidak memiliki pilihan lain secara finansial.

Kondisi ini mencerminkan kerentanan struktural yang dihadapi masyarakat miskin pesisir. Adaptasi teknis yang dilakukan tidak serta-merta mampu meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh karena keterbatasan daya dukung ekonomi. Rumah hanya berfungsi sebatas tempat berteduh dari genangan, bukan

lagi sebagai ruang yang layak dan nyaman untuk menjalani kehidupan sehari-hari.



Gambar 3. Kondisi Rumah yang Telah Direnovasi
Sumber: Dokumen Pribadi tahun 2025

Dalam menghadapi situasi tersebut, sejumlah warga melakukan renovasi rumah dengan membangun struktur rumah panggung, sebagai bentuk adaptasi jangka menengah hingga panjang. Rumah panggung dibangun dengan cara meninggikan seluruh struktur rumah dari tanah menggunakan tiang-tiang penyangga beton atau kayu keras yang tahan terhadap kelembaban dan air asin. Model rumah ini memungkinkan lantai rumah berada jauh di atas permukaan air rob, sehingga genangan tidak lagi memasuki ruang utama tempat tinggal. Pada umumnya, bagian bawah rumah yang kosong dibiarkan terbuka atau digunakan sebagai

tempat penyimpanan, kandang ternak, atau area aktivitas ringan.

Menurut penuturan Ibu Surtini, ia mengatakan pembangunan rumah panggung relatif mahal, terutama dalam hal material penyangga, pengerjaan konstruksi, dan penguatan struktur. Oleh karena itu, hanya sebagian warga khususnya mereka yang memiliki kemampuan ekonomi menengah yang dapat melakukan renovasi penuh menjadi rumah panggung. Sementara warga lain yang kurang mampu masih mengandalkan renovasi parsial atau hanya menaikkan lantai tanpa mengubah struktur keseluruhan rumah. Menurut pengakuannya, hampir setiap tahun warga membeli tanah untuk peninggian, tentu hal ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit apalagi tanpa adanya bantuan dari pemerintah.

Masyarakat juga melakukan penggalian atau pembuatan saluran air kecil secara mandiri di sekitar rumah mereka untuk mempercepat aliran air rob keluar dari halaman rumah. Tindakan ini sangat membantu dalam mengurangi durasi genangan air. Renovasi rumah yang dilakukan masyarakat Desa Sriwulan merupakan bentuk adaptasi struktural berbasis komunitas yang mencerminkan daya lenting (*resilience*) dan kreativitas lokal dalam menghadapi perubahan

lingkungan ekstrem. Upaya ini juga dapat dipahami dalam kerangka politik kewargaan Kristian Stokke, sebagai bentuk kewargaan aktif, di mana masyarakat mengambil peran dalam memperjuangkan hak atas hunian yang layak di tengah keterbatasan intervensi negara.

c) Tanggul Sekitar Rumah

Warga Desa Sriwulan melakukan upaya sederhana untuk mencegah air rob masuk ke dalam rumah dengan membuat tanggul manual di sekitar tempat tinggal mereka. Tanggul ini dibangun dengan cara menumpuk material seperti tanah dan batu di tepi rumah, baik langsung di permukaan tanah maupun dimasukkan ke dalam karung yang disusun rapi. Umumnya, tumpukan tersebut dibatasi dengan bambu agar material tidak berserakan. Selain di sekitar rumah, tanggul-tanggul sederhana ini juga dibuat di sepanjang bantaran sungai. Dengan adanya tanggul, air rob dapat dicegah masuk ke dalam rumah, dan saluran air pun tetap bersih dari sampah yang bisa menyumbat jalannya air. Warga secara rutin mengadakan kerja bakti sebagai bentuk gotong royong untuk mengurangi risiko banjir rob yang lebih besar.



Gambar 4. Penggunaan Tanggul Darurat oleh Warga

Sumber: Dokumen Pribadi tahun 2025

Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, merupakan wilayah yang berada di garis depan terhadap ancaman banjir rob akibat naiknya permukaan air laut dan penurunan muka tanah. Kondisi geografis desa yang rendah serta sistem drainase yang terbatas menyebabkan air rob mudah masuk ke kawasan permukiman. Untuk mengatasi hal ini, masyarakat dan pemerintah setempat melakukan berbagai bentuk pembangunan tanggul air sebagai upaya mitigasi dan adaptasi terhadap bencana.

Selain tanggul darurat oleh warga, pemerintah juga membangun tanggul permanen di beberapa titik strategis, terutama di sepanjang garis pantai dan tepi sungai yang rawan rob. Pembangunan tanggul ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Demak bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan

Kementerian PUPR melalui proyek-proyek pengendalian banjir pesisir.



Gambar 5. Pembangunan Tanggul Permanen oleh Pemerintah

Sumber: Dokumen Pribadi tahun 2025

Tanggul permanen biasanya dibuat dari konstruksi beton atau batu kali, dengan tinggi yang disesuaikan terhadap rata-rata pasang air laut. Namun, cakupan pembangunan tanggul ini belum menyeluruh dan masih banyak kawasan di Desa Sriwulan yang belum terlindungi, terutama pemukiman padat penduduk yang berada agak jauh dari jalur utama. Kehadiran tanggul, baik yang dibangun oleh warga secara mandiri maupun oleh pemerintah, mencerminkan adanya kolaborasi antara upaya komunitas dan kebijakan negara dalam menghadapi dampak perubahan iklim pesisir. Namun,

kesenjangan dalam akses terhadap pembangunan tanggul permanen menunjukkan bahwa tidak semua warga mendapat perlindungan yang setara. Hal ini memperlihatkan pentingnya pemerataan intervensi dan pendampingan dari negara agar upaya mitigasi tidak hanya bertumpu pada daya tahan masyarakat.

Dalam konteks politik kewargaan (Kristian Stokke), tindakan warga membangun tanggul manual bisa dipahami sebagai bentuk kewargaan aktif, di mana masyarakat tidak hanya menunggu bantuan pemerintah, tetapi berinisiatif menjaga ruang hidup mereka secara mandiri. Sementara itu, keberadaan tanggul permanen oleh pemerintah mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas perlindungan lingkungan dan tempat tinggal yang aman bagi seluruh warganya.

2) Adaptasi Sosial-Ekonomi

a) Perubahan Mata Pencarian

Warga Desa Sriwulan terpaksa mengalihkan profesi akibat banjir rob yang hampir setiap hari menggenangi pemukiman mereka. Sebelumnya, banyak warga yang bekerja sebagai petani, namun sawah dan kebun mereka kini hilang karena terus-menerus tergenang air rob. Akibatnya, mereka beralih profesi menjadi pembudidaya tambak, seperti udang, ikan sriding, dan jenis perikanan lainnya. Sementara itu,

sebagian nelayan yang biasa melaut kini memilih bekerja sebagai buruh pabrik karena penghasilan yang lebih pasti setiap bulan. Hal ini dirasa lebih aman dibandingkan bekerja sebagai nelayan, yang penghasilannya tidak menentu dan sering terhambat oleh cuaca ekstrem seperti angin kencang dan gelombang tinggi yang membahayakan keselamatan saat melaut.

Seperti yang diungkapkan Bapak Nuril, akibat banjir rob yang terus-menerus melanda, sebagian ia terpaksa meninggalkan profesinya sebagai petani karena lahan pertanian tidak lagi bisa digarap. Sebagai bentuk adaptasi, ia pun beralih menjadi distributor air pegunungan untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat setempat yang juga terdampak rob.



Gambar 6. Dampak Banjir Rob Mengakibatkan Alih Mata Pencaharian Warga

Sumber: Dokumen Pribadi tahun 2025

Sebagian warga desa Sriwulan juga beralih mata pencaharian menjadi buruh pabrik, peralihan mata pencaharian dari nelayan menjadi buruh pabrik terjadi karena dampak banjir rob yang berkepanjangan, di mana warga membutuhkan penghasilan tambahan untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak. Meski begitu, sebagian besar warga tidak sepenuhnya meninggalkan profesi sebagai nelayan. Melaut tetap dijalani sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan. Selain itu, banyak warga juga memiliki usaha sampingan lainnya, seperti bertani mangrove atau membudidayakan udang dan hasil perikanan lainnya.

Di desa Sriwulan, hampir semua warga yang memilih tetap tinggal tidak hanya mengandalkan pekerjaan di sektor perikanan. Mereka mencari berbagai sumber penghasilan lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dalam menjalankan pekerjaan tersebut, warga menjalin hubungan kerja yang dilandasi saling percaya dan solidaritas, karena mereka sama-sama mengalami dampak dari bencana rob. Nilai-nilai sosial dan semangat gotong royong tetap dijaga agar kerja sama yang terjalin bisa mendorong produktivitas dan memberikan keuntungan bersama untuk mencukupi kebutuhan keluarga masing-masing.

b) Adaptasi Kegiatan Sekolah

Madrasah apung yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama (NU) di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, merupakan bentuk inovasi sosial dan pendidikan dalam merespons krisis ekologis akibat bencana rob yang melanda wilayah pesisir tersebut. Fenomena banjir rob yang telah berlangsung secara kronis selama lebih dari satu dekade menyebabkan banyak fasilitas pendidikan, termasuk madrasah dan sekolah dasar, mengalami kerusakan permanen atau bahkan tenggelam. Dalam konteks ini, madrasah apung hadir sebagai solusi adaptif yang tidak hanya mempertahankan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terdampak, tetapi juga menjadi simbol ketahanan komunitas terhadap perubahan lingkungan ekstrem.

Madrasah apung ini dibangun di atas struktur rakit yang mengapung di atas air pasang, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan fluktuasi permukaan laut. Inisiatif ini lahir dari kolaborasi antara warga lokal dengan jaringan NU, termasuk lembaga filantropi di bawah naungan NU yang peduli terhadap pendidikan dan kemanusiaan. Secara struktural, madrasah apung didesain dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, keberlanjutan, dan aksesibilitas, dengan

menggunakan bahan-bahan yang mudah diperoleh serta ramah lingkungan.



Gambar 7. Madrasah Apung yang Didirikan oleh NU

Sumber: <https://images.app.goo.gl/PaCkcuhg0KEbrosJ9>

Secara sosiologis, kehadiran madrasah apung tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan, tetapi juga memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat yang terdampak banjir rob. Lembaga ini menjadi ruang kolektif di mana anak-anak, guru, dan orang tua membangun interaksi yang memperkuat identitas keagamaan dan solidaritas sosial. Selain itu, madrasah apung ini mencerminkan peran signifikan organisasi masyarakat sipil, khususnya NU, dalam menjawab tantangan pembangunan di wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam.

Dalam perspektif pendidikan berbasis komunitas dan adaptasi sosial, madrasah apung milik NU di Timbulsloko dapat dilihat sebagai bentuk realisasi dari konsep pendidikan kontekstual. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai transfer pengetahuan di dalam ruang kelas formal, tetapi juga sebagai bagian dari strategi bertahan hidup dan penguatan kapasitas lokal dalam menghadapi dinamika sosial-ekologis yang kompleks. Dengan demikian, madrasah apung ini menjadi model penting dalam studi tentang adaptasi masyarakat pesisir terhadap perubahan lingkungan, serta menunjukkan bagaimana aktor-aktor lokal, seperti organisasi keagamaan, memainkan peran vital dalam menjembatani kebutuhan dasar masyarakat di tengah krisis yang terus berlangsung.

c) Gotong Royong

Warga Desa Sriwulan terbiasa bergotong royong dalam berbagai hal, terutama saat membersihkan lingkungan sekitar desa. Mereka sangat menjaga kebersihan area di sepanjang sungai agar air rob tidak meluap ke pemukiman. Kegiatan pembersihan saluran air ini sering dilakukan secara mandiri oleh warga, meskipun terkadang mereka juga terlibat dalam kegiatan yang difasilitasi oleh komunitas-komunitas di bawah koordinasi pemerintah desa. Tingginya

kepedulian warga muncul karena mereka merasa memiliki nasib yang sama sebagai korban banjir rob. Rasa kebersamaan itulah yang mendorong mereka untuk saling membantu dan beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang sudah tergenang.

Menurut penuturan Pak Kholis, warga saling bantu membantu dan bergotong royong, ketika ada perbaikan jalan atau masjid banyak warga yang menyalurkan bantuan tenaga fisik maupun makanan. Hal ini menunjukkan bahwa warga bergantung, saling membantu, dan menunjukkan kepedulian terhadap kehidupan satu sama lain. Tingginya rasa saling percaya antar warga muncul karena mereka mengalami nasib yang sama sebagai korban banjir rob. Ikatan sosial yang terbentuk antarwarga dari berbagai latar belakang menjadi kekuatan penting bagi mereka untuk bertahan hidup di wilayah yang sering tergenang air rob. Selain itu, norma-norma sosial yang berlaku di desa bersifat positif dan mempererat solidaritas antarwarga. Hubungan yang terjalin didasarkan pada kepercayaan dan kerja sama, yang mendorong terciptanya lingkungan sosial yang saling mendukung.

BAB IV

PERJUANGAN MASYARAKAT TERDAMPAK BANJIR ROB DALAM MENUNTUT HAK KEWARGAAN

A. Bentuk Perjuangan Melalui Aksi Kolektif dalam Menuntut Hak Kewargaan

Masyarakat Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, yang telah bertahun-tahun terdampak oleh bencana banjir rob, tidak hanya menunjukkan upaya adaptif secara fisik dalam mempertahankan tempat tinggal mereka, tetapi juga menampilkan berbagai bentuk perjuangan kolektif dalam menuntut pemenuhan hak-hak dasar sebagai warga negara. Perjuangan ini tidak semata-mata dilakukan sebagai respons atas kerentanan ekologis dan kerusakan material, melainkan juga sebagai ekspresi kesadaran politik kewargaan dimana masyarakat memahami bahwa negara berkewajiban memenuhi hak-hak dasar, termasuk hak atas tempat tinggal yang layak, akses air bersih, dan perlindungan dari bencana.

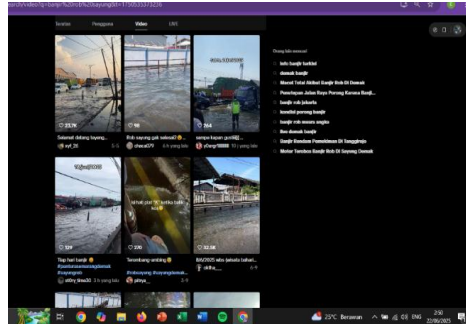
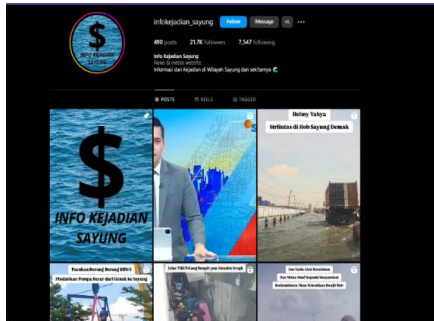
1. Viralitas sebagai Strategi Advokasi Digital

Dalam konteks perjuangan masyarakat pesisir yang terdampak banjir rob di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, media sosial telah menjadi salah satu saluran penting dalam menyuarakan aspirasi dan tuntutan mereka terhadap negara serta publik yang lebih luas. Aksi kolektif yang dilakukan warga Sayung melalui platform seperti Instagram dan TikTok mencerminkan transformasi bentuk-bentuk perlawanan

konvensional menjadi model advokasi digital (*digital activism*). Strategi ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan akses terhadap media arus utama dan lambannya respons institusional dari pihak pemerintah.

Platform media sosial yang digunakan yakni Instagram dan TikTok, menjadi medium strategis yang dimanfaatkan masyarakat, terutama generasi muda dan kelompok-kelompok relawan lokal untuk memviralkan kondisi banjir rob. Faktor yang memicu terjadinya perjuangan masyarakat melalui media massa ini diakibatkan oleh keterbatasan masyarakat dalam memberikan suara untuk pertolongan serta lambannya respons pemerintah.

Bentuk media yang diunggah berupa foto maupun video yang memperlihatkan rumah yang terendam, akses jalan yang rusak, sekolah yang tergenang, hingga aktivitas warga yang tetap berlangsung dalam genangan air, masyarakat Sayung menyampaikan realitas keseharian mereka secara langsung dan tanpa filter. Unggahan-unggahan ini sering dibubuhi tagar seperti **#SaveSayung**, **#BanjirRobDemak**, atau **#TenggelamnyaDesaKami**, yang menjadi penanda kolektif perjuangan mereka di ruang digital. Bukti nyata unggahan-unggahan tersebut dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Akun Media Sosial sebagai Arena Advokasi Warga
Sumber: Media Sosial Instagram dan Tiktok Info Kejadian Sayung

Menurut *Castells* (2012), dalam masyarakat jaringan (*network society*), kekuasaan dan perlawanan tidak hanya berlangsung di ruang fisik tetapi juga di ruang digital, yang disebutnya sebagai *space of flows*. Dalam ruang ini, masyarakat yang sebelumnya termarginalkan secara geografis dapat membentuk jaringan solidaritas, memperluas jangkauan isu yang mereka angkat, dan mendesak pihak-pihak yang berwenang untuk memberikan tanggapan. Hal ini selaras dengan teori *civic engagement* yang menekankan pentingnya partisipasi warga negara dalam bentuk baru yang lebih fleksibel dan terdesentralisasi (Bennett & Segerberg, 2012).

Unggahan-unggahan tersebut menjadi sebuah viralitas konten mengenai banjir rob. Hal tersebut menunjukkan sebuah epskesi individual, tetapi mencerminkan aksi kolektif yang tersusun secara spontan dan bersifat organik. Setiap unggahan

dari individu warga memperkuat narasi kolektif tentang penderitaan dan ketidakadilan ekologis yang dialami oleh masyarakat Sayung. Adanya unggahan-unggahan tersebut pada media sosial menyebabkan terjadinya komunikasi antara masyarakat lokal dengan publik yang lebih luas seperti masyarakat diluar Kecamatan Sayung hingga juga dapat tersampaikan pada pihak pemerintah. Masyarakat juga tidak hanya menjadi konsumen informasi tetapi produsen informasi yang kredibel. Hal ini menunjukkan sebuah tekanan sosial terhadap instansi pemerintahan. Namun, tidak terpungkiri bahwa efek dari unggahan tersebut menjadi sebuah bantuan untuk masyarakat sekitar karena terdapat lembaga non-pemerintah yang menyalurkan bantuan, salah satunya seperti Human Initiative Jawa Tengah yang menyalurkan bantuan seperti mendirikan pos air serta kebutuhan pokok lainnya. Selain itu, pada pertengahan 2024, sebuah video viral dari Desa Timbulsloko yang menunjukkan prosesi pernikahan di tengah banjir rob mendapat perhatian luas, termasuk dari media nasional seperti Kompas.com dan Detik. Respons ini memicu kunjungan langsung dari pejabat pemerintah provinsi dan memunculkan kembali tuntutan untuk mempercepat pembangunan tanggul laut dan relokasi warga yang terdampak paling parah. Hal tersebut terjadi karena menjadi sebuah sorotan di tingkat nasional dan menunjukkan *user-generated content* memiliki potensi besar dalam menciptakan

kesadaran kolektif publik serta mengubah persepsi terhadap isu yang selama ini dipinggirkan.

2. Proposal sebagai Instrumen Negosiasi Kewargaan dalam Perjuangan Masyarakat Sayung

Dalam konteks masyarakat terdampak bencana ekologis seperti banjir rob di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, proposal tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif atau teknokratik. Lebih dari itu, proposal menjadi alat penting dalam negosiasi kewargaan yakni sebuah mekanisme warga untuk menegosiasikan hak, peran, dan relasi kuasa antara negara dan warga negara. Melalui proposal, masyarakat secara sadar mengklaim hak-hak dasarnya sebagai warga negara yang dijamin dalam konstitusi, seperti hak atas lingkungan yang sehat, tempat tinggal yang layak, perlindungan dari bencana, serta partisipasi dalam perencanaan pembangunan.

Proposal berfungsi sebagai alat negosiasi yang krusial dalam interaksi antara individu atau organisasi dengan pemerintah. Dalam konteks ini, proposal tidak hanya berperan sebagai dokumen usulan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan ide, kebutuhan, dan harapan yang jelas dan terstruktur. Melalui proposal, pihak yang mengajukan dapat mengartikulasikan tujuan dan manfaat dari suatu proyek atau program yang diusulkan, serta menjelaskan bagaimana inisiatif tersebut sejalan dengan kebijakan publik dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, proposal yang disusun dengan

baik dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah, karena ia memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak positif yang dapat dihasilkan.

Selain itu, proses penyusunan proposal juga melibatkan analisis mendalam terhadap konteks sosial, ekonomi, dan politik yang relevan, sehingga dapat menciptakan argumen yang kuat dan meyakinkan. Dalam negosiasi, proposal yang efektif akan memfasilitasi dialog konstruktif antara pihak-pihak yang terlibat, memungkinkan tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi penulis proposal untuk memahami dinamika negosiasi dan menyesuaikan isi proposal dengan kebutuhan serta harapan pemerintah, sehingga dapat menciptakan sinergi yang positif dalam pelaksanaan program yang diusulkan. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, proposal tidak hanya menjadi alat untuk mendapatkan persetujuan, tetapi juga sebagai medium untuk membangun hubungan yang lebih baik antara masyarakat dan pemerintah, serta mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

Menurut Stokke (2017), negosiasi kewargaan (*citizenship negotiation*) merujuk pada proses di mana warga negara secara aktif menyatakan, menegosiasikan, dan memperjuangkan hak-haknya melalui interaksi dengan institusi-institusi negara. Dalam hal ini, kewargaan bukan sekadar status hukum, tetapi mencakup

praktik sosial dan politik yang memungkinkan warga untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan arah kebijakan yang menyangkut kehidupannya. Proposal warga merupakan bagian dari praktik tersebut. Ia bukan hanya alat birokratis, tetapi juga representasi dari klaim politik warga terhadap tanggung jawab negara yang selama ini absen atau tidak optimal dalam menangani permasalahan banjir rob.

Masyarakat Sayung, khususnya di desa-desa pesisir seperti Timbulsloko, Bedono, dan Sriwulan, telah mengalami dampak banjir rob selama lebih dari satu dekade. Ketiadaan tanggul permanen, kerusakan jalan nasional yang terus terendam, hingga abrasi yang menggerus permukiman warga menjadi bukti nyata dari kegagalan negara dalam melindungi hak dasar warga. Melalui penyusunan dan pengajuan proposal, warga secara sadar mengartikulasikan permasalahan struktural yang mereka hadapi dan menawarkan solusi berbasis kebutuhan lokal. Dalam banyak kasus, proposal tersebut diajukan secara kolektif, melalui musyawarah warga, forum masyarakat, atau aliansi antar-desa, yang menandai tingginya kesadaran kolektif dan kapasitas politik warga dalam memperjuangkan haknya.

Isi proposal umumnya mencakup:

- a. Deskripsi masalah banjir rob secara rinci dan berbasis data lokal.
- b. Permintaan pembangunan tanggul, perbaikan drainase, jalan inspeksi, atau relokasi.

- c. Perkiraan anggaran dan pembagian tanggung jawab antara pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi.
- d. Penegasan bahwa kondisi tersebut mengancam hak-hak dasar warga dan membutuhkan intervensi negara secara mendesak.

Dengan demikian, proposal menjadi sarana formal yang dipakai warga untuk memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) dalam hubungan mereka dengan pemerintah. Proposal warga tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan merupakan bagian dari strategi perjuangan politik yang lebih luas. Sebagai alat politik, proposal memungkinkan masyarakat:

- a. Memasuki ruang-ruang formal perencanaan pembangunan (misalnya melalui Musrenbang).
- b. Mengadvokasi kebijakan berbasis data dan pengalaman langsung warga terdampak.
- c. Menggalang dukungan dari aktor eksternal seperti LSM, akademisi, dan media.
- d. Memperoleh legitimasi atas tuntutan kolektif mereka dalam kerangka hukum dan pemerintahan.

Dalam hal ini, proposal berfungsi bukan hanya sebagai permohonan, tetapi sebagai dokumen negosiasi antara warga dan negara, yang mengandung makna simbolik dan politis. Ia adalah pernyataan bahwa warga adalah bagian dari negara yang sah, yang tidak hanya memiliki kewajiban, tetapi juga hak untuk dilayani dan dilindungi. Penyusunan proposal sering kali

melibatkan berbagai aktor sosial: tokoh masyarakat, pemuda, kelompok perempuan, hingga LSM yang mendampingi warga dalam mengidentifikasi masalah dan menyusun rencana aksi. Namun demikian, proses ini juga menghadapi sejumlah tantangan:

- a. Pemerintah daerah cenderung menolak atau menunda proposal karena dianggap tidak sesuai dengan skala prioritas pembangunan.
- b. Ketiadaan pendampingan teknis menyebabkan proposal warga kerap dianggap “tidak layak secara administratif”.
- c. Terjadi ketimpangan kuasa antara warga yang terdampak dan pejabat publik yang memegang otoritas pengambilan keputusan.

Meskipun begitu, keberanian masyarakat dalam menyusun dan mengajukan proposal merupakan bentuk perlawanan simbolik terhadap narasi negara yang sering kali meminggirkan masyarakat pesisir sebagai kelompok marginal. Dalam konteks banjir rob yang berkepanjangan, proposal ini menjadi alat penting dalam memperjuangkan keadilan ekologis dan sosial, serta menegosiasikan relasi kekuasaan antara masyarakat dan negara. Dengan menyusun dan menyampaikan proposal secara kolektif dan argumentatif, masyarakat Sayung menunjukkan kapasitas politiknya sebagai aktor kewargaan yang aktif, sadar, dan terorganisir.

Tidak semua bentuk perjuangan berlangsung dalam skala besar atau terbuka, di tingkat mikro, perjuangan juga hadir dalam bentuk musyawarah warga dan forum informal antara tokoh masyarakat, perangkat desa, dan perwakilan warga terdampak. Forum-forum tersebut digunakan untuk menyuarkan kebutuhan mendesak, seperti bantuan untuk peninggian rumah, akses terhadap air bersih, serta permohonan layanan kesehatan keliling di desa-desa yang sulit dijangkau akibat banjir rob. Bentuk perjuangan ini, meskipun tidak mencolok, memiliki peran penting dalam membangun kesadaran kolektif dan solidaritas sosial. Namun, dalam kenyataannya, banyak warga menyampaikan bahwa upaya perjuangan mereka belum sepenuhnya mendapatkan respon dari pemerintah. Dalam wawancara mendalam, Ibu Surtini, warga Desa Sriwulan, menyatakan:

“Kami di sini udah terbiasa sama rob mba, tapi tetep aja berat. Rumah ini udah beberapa kali kami tinggikan pakai dana sendiri. Ngga ada bantuan dari pemerintah, semua biaya dari kantong pribadi. Mau ngga mau harus dilakukan, kalau engga ya air terus masuk rumah.” (Wawancara, Surtini, warga desa Sriwulan, 14 Juni 2025)

Pernyataan tersebut memperlihatkan bagaimana warga harus memikul beban sendiri dalam menyelamatkan hunian mereka dari kerusakan. Kondisi serupa juga dialami oleh Ibu Rodiyah, warga Desa Gemulak, yang mengatakan:

“Udah lama banjir rob kaya gini, tapi ngga pernah ada bantuan dari pemerintah buat peninggian rumah. Semua pakai uang sendiri. Mau pindah ke tempat lain juga ngga ada biaya, jadi kami terpaksa tetap tinggal di sini walaupun tiap hari dikepung air” (Wawancara, Rodiyah, warga desa Gemulak, 18 Juni 2025)

Kedua kutipan tersebut menegaskan bahwa perjuangan masyarakat bukan hanya ditujukan untuk memperbaiki kondisi fisik tempat tinggal, tetapi juga merupakan ekspresi dari ketidakpuasan terhadap minimnya perhatian dan bantuan dari negara. Dalam perspektif Kristian Stokke (2009), fenomena ini dapat dibaca sebagai praktik *citizenship from below*, yaitu bentuk politik kewargaan yang lahir dari bawah di mana warga tidak sekadar menunggu bantuan negara, tetapi secara aktif melakukan klaim atas hak dan keadilan sosial, melalui berbagai kanal perjuangan baik formal maupun informal.

Dengan demikian, perjuangan masyarakat Sayung menunjukkan bahwa mereka bukan aktor pasif dalam menghadapi bencana ekologis, melainkan agen yang aktif, berdaya, dan sadar akan hak-hak kewargaan mereka. Perjuangan tersebut tidak hanya membentuk resistensi terhadap ketidakadilan struktural, tetapi juga menjadi bagian dari proses demokratisasi lokal yang memperkuat kapasitas warga untuk menuntut keadilan dalam konteks pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap kelompok rentan.

a) Aksis Demonstrasi Proses Negosiasi dengan Pemerintah

Perjuangan masyarakat Kecamatan Sayung dalam menghadapi banjir rob tidak hanya berlangsung dalam bentuk adaptasi pasif atau tindakan individual, melainkan juga melalui upaya kolektif dan formal yang dilakukan secara sadar dan terstruktur. Salah satu bentuk nyata dari perjuangan tersebut adalah proses negosiasi dengan pemerintah, yang mencerminkan upaya warga negara dalam memperjuangkan hak-hak dasarnya melalui saluran formal politik kewargaan.

Negosiasi yang dilakukan oleh masyarakat Sayung dengan pemerintah Kabupaten Demak merupakan bentuk artikulasi dari kesadaran politik warga bahwa mereka memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman, layak, dan bebas dari ancaman bencana yang berlangsung terus-menerus. Dalam hal ini, teori politik kewargaan menurut Kristian Stokke (2009) menjadi relevan untuk memahami bagaimana warga yang selama ini berada dalam posisi marginal, berusaha memasuki ruang-ruang kekuasaan untuk mempengaruhi kebijakan publik.

b) Kesadaran Kolektif dan Pembentukan Forum Advokasi

Awal mula perjuangan masyarakat ditandai dengan terbentuknya Forum Masyarakat Peduli Sayung (FMPS), sebuah forum akar rumput yang lahir dari keresahan kolektif terhadap dampak rob yang terus memburuk tanpa adanya

solusi konkret dari pemerintah. Forum ini menjadi ruang penting bagi warga untuk mendiskusikan masalah bersama, membangun solidaritas lintas desa, dan menyusun agenda perjuangan bersama. Konsolidasi ini dilakukan secara swadaya dan berulang kali melalui pertemuan desa dan musyawarah antar-wilayah. Dalam beberapa kasus, forum ini bahkan mengorganisasi pelatihan dasar tentang advokasi kebijakan dan pemetaan wilayah rawan.

“Kami sadar bahwa kalau hanya bergerak sendiri-sendiri, kami tidak akan didengar. Maka kami satukan suara, kumpulkan bukti-bukti, dan ajukan tuntutan sebagai satu kekuatan masyarakat.”
(Wawancara dengan Ketua FMPS, 20 April 2024)

Negosiasi melalui Audiensi Formal dan Lobi Kebijakan

Dengan dukungan forum tersebut, masyarakat memulai proses negosiasi formal dengan pemerintah daerah. Negosiasi dilakukan melalui serangkaian audiensi resmi yang melibatkan berbagai instansi, mulai dari Bupati Demak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Bappeda, hingga BPBD. Selama periode 2022 hingga 2024, terdapat empat kali pertemuan audiensi utama yang tercatat, di mana warga secara langsung menyampaikan kondisi lapangan, dokumen tuntutan, dan proposal solusi. Dalam audiensi tersebut, warga menuntut:

1. Pembangunan tanggul permanen di titik rawan rob seperti Desa Timbulsloko dan Bedono
2. Relokasi warga terdampak berat ke lokasi yang aman dan layak huni
3. Perbaikan dan pembangunan akses jalan darurat
4. Penyediaan air bersih, sanitasi, dan dukungan logistik pasca-banjir

Namun, dalam banyak kesempatan, negosiasi tersebut hanya menghasilkan janji verbal atau pengalihan ke program jangka panjang yang belum jelas implementasinya.

“Kami sudah berkali-kali datang ke kantor Bupati, tapi setiap kali jawabannya sama: masih dikaji, masih diusulkan. Padahal rob itu datang setiap hari, bukan setiap tahun.” (Wawancara dengan warga Bedono, 14 Mei 2024)

Ketidakseimbangan relasi kuasa antara pemerintah dan warga menjadi tantangan tersendiri. Warga tidak memiliki kekuatan hukum maupun politik yang besar, tetapi melalui negosiasi berulang dan konsistensi perjuangan, mereka berhasil membangun tekanan moral terhadap pemerintah.

c) Peran LSM, Akademisi, dan Jaringan Pendukung

Dalam proses negosiasi ini, peran pendamping dari luar komunitas menjadi krusial. Beberapa LSM lingkungan seperti, WALHI Jawa Tengah, serta akademisi dari Universitas Diponegoro dan UIN Kudus, turut berkontribusi

dalam menyediakan data teknis, penyusunan proposal kebijakan, hingga strategi advokasi. Kolaborasi ini menjadikan suara warga lebih sistematis dan berbasis bukti ilmiah. Peta kerentanan banjir rob, simulasi relokasi, dan rencana tanggap darurat disusun bersama sebagai bahan pendukung untuk memperkuat argumen warga dalam forum negosiasi.

“Kalau dulu kami hanya bawa keluhan, sekarang kami bisa bawa data, peta, bahkan rencana teknis. Itu membuat suara kami lebih didengar meskipun belum sepenuhnya ditindaklanjuti.” (Wawancara dengan anggota FMPS, 25 Mei 2024)

d) Tekanan Publik melalui Aksi Kolektif dan Media Sosial

Ketika negosiasi dianggap stagnan, masyarakat mengombinasikan strategi formal dengan aksi kolektif sebagai bentuk tekanan moral dan politik terhadap pemerintah. Aksi yang paling menonjol terjadi pada 28 Februari 2024, saat ratusan warga menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati Demak. Dalam aksi tersebut, masyarakat membawa poster-poster simbolik dan menggelar orasi yang menuntut kehadiran negara di tengah krisis rob. Aksi ini berhasil menarik perhatian media lokal dan nasional, serta menjadi viral di media sosial, memperkuat narasi publik bahwa Sayung adalah wilayah darurat bencana. Selain demonstrasi, warga juga aktif mendokumentasikan

kondisi rob melalui video, foto, dan testimoni yang disebar di platform digital. Hal ini menciptakan solidaritas publik yang lebih luas dan menambah tekanan kepada pemerintah agar segera bertindak.

e) Peran Tokoh Agama dan Organisasi Keagamaan (NU)

Salah satu kekuatan sosial-politik yang memperkuat perjuangan masyarakat Sayung adalah keterlibatan tokoh agama dan organisasi masyarakat keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU). Tokoh-tokoh NU hadir dalam audiensi, memberikan dukungan moral, serta menjembatani komunikasi antara warga dan pejabat daerah. Kehadiran tokoh agama menjadikan perjuangan masyarakat bukan hanya isu sosial, tetapi juga bernilai moral dan spiritual, terutama di wilayah yang sangat menjunjung tinggi norma agama.

“Kami hadir karena ini adalah bagian dari amar ma’ruf. Jika negara lambat, maka masyarakat sipil, termasuk ormas, harus mendampingi rakyat kecil.”
(Wawancara dengan KH. Aminuddin Masyhudi dari NU Demak, 10 Mei 2024)

f) Capaian dan Evaluasi Negosiasi

Dari proses panjang negosiasi tersebut, beberapa capaian awal mulai terlihat:

- 1) Pemerintah melalui Bappeda telah menyusun *Masterplan* Penanggulangan Rob Sayung 2025–2030

- 2) Dinas PUPR membangun tanggul darurat di dua desa sebagai respons sementara
- 3) Pemerintah mulai mempertimbangkan skema relokasi bertahap untuk warga yang rumahnya tidak layak huni.

Meskipun begitu, mayoritas program masih dalam tahap perencanaan. Banyak warga tetap merasa bahwa implementasi kebijakan masih lambat, sehingga mereka membentuk tim pemantau kebijakan di tingkat desa untuk mengawal janji-janji pemerintah.

Perjuangan melalui negosiasi yang dilakukan masyarakat Sayung mencerminkan proses pematangan politik kewargaan. Mereka tidak lagi berada dalam posisi diam dan pasrah, tetapi tampil sebagai aktor aktif yang memahami hak-haknya, menyusun strategi perjuangan, membangun aliansi, dan menavigasi ruang negosiasi formal untuk mencapai perubahan. Negosiasi ini bukan hanya soal komunikasi, melainkan bentuk pertarungan narasi, data, dan legitimasi antara negara dan rakyatnya. Dalam konteks ini, warga Sayung menunjukkan bahwa perjuangan kewargaan dapat dijalankan melalui pendekatan kolaboratif namun kritis, berbasis komunitas namun terhubung dengan jaringan lebih luas.

B. Bentuk Perjuangan Melalui Organisasi Masyarakat

Dalam konteks perjuangan masyarakat terdampak banjir rob di Kecamatan Sayung, peran organisasi lokal dan tokoh masyarakat memiliki posisi yang sangat krusial sebagai penggerak utama dalam membangun solidaritas, mengorganisasi aksi kolektif, serta memperkuat resistensi sosial terhadap kondisi struktural yang timpang. Masyarakat yang terus-menerus terdampak oleh banjir rob tidak hanya mengalami kerugian secara ekonomi dan ekologis, tetapi juga kerap dihadapkan pada keterasingan struktural, yakni ketidakhadiran negara secara memadai dalam merespons persoalan mereka secara komprehensif. Dalam kondisi demikian, organisasi masyarakat sipil, khususnya berbasis keagamaan, tampil sebagai kekuatan sosial yang mampu mengartikulasikan keresahan warga, menjembatani komunikasi antara rakyat dan negara, serta memperjuangkan keadilan ekologis dan hak-hak dasar warga yang terdampak.

Keberadaan organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU), khususnya melalui struktur-struktur otonomnya seperti Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBINU), Gerakan Pemuda Ansor, Muslimat NU, dan jaringan pesantren, terbukti memainkan peran yang tidak sekadar bersifat karitatif atau spiritual, melainkan juga politis dan strategis. Di wilayah Demak, NU memiliki akar yang kuat dan pengaruh sosial yang besar di tengah masyarakat, menjadikannya sebagai aktor yang legitimate dalam memperjuangkan aspirasi warga. NU tidak hanya memberikan

penguatan secara rohaniah kepada korban bencana, tetapi juga bertindak secara konkret dalam bentuk penggalangan bantuan sosial, edukasi bencana, penyediaan ruang konsolidasi, hingga mendorong aksi kolektif yang bersifat simbolik maupun nyata. Dalam hal ini, NU memperlihatkan kapasitasnya dalam menjawab tantangan ekologis dan sosial yang dihadapi masyarakat pesisir, dengan pendekatan berbasis nilai-nilai keislaman, tradisi lokal, dan kesadaran kolektif.



Gambar 9. Istighosah bersama oleh NU didepan Pabrik Polytron

Sumber: Dokumen Pribadi tahun 2025

Salah satu manifestasi nyata dari perjuangan ini adalah diselenggarakannya aksi *istighosah on the road*, sebuah doa bersama yang dilakukan secara terbuka di jalan raya yang terdampak banjir rob, sebagai bentuk protes simbolik sekaligus seruan spiritual agar pemerintah segera menangani krisis ekologis yang berkepanjangan. Aksi ini sempat viral di berbagai platform media sosial, dan menarik perhatian publik secara luas. Aksi tersebut tidak hanya menunjukkan

ekspresi keagamaan masyarakat, tetapi juga memuat makna politis yang mendalam, yakni sebagai strategi tekanan moral kepada pemerintah agar mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan rob secara menyeluruh, bukan parsial dan sesaat. Dalam hal ini, NU menunjukkan kemampuannya sebagai institusi yang mampu menggerakkan massa secara damai, bermartabat, dan tetap dalam kerangka keagamaan yang inklusif.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Demak, KH. Muhammad Aminudin, dijelaskan bahwa NU merasa terpenggil secara moral dan spiritual untuk menyuarakan penderitaan masyarakat yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Menurutnya, selama lebih dari satu dekade masyarakat Sayung hidup dalam ketidakpastian akibat banjir rob yang terus datang silih berganti, sementara solusi dari pemerintah cenderung bersifat sementara dan tidak menyentuh akar persoalan. NU, dalam hal ini PCNU Demak, mengambil posisi untuk mengawal aksi *istighosah* di jalan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan keagamaan terhadap umat. Hal ini dilakukan tidak untuk konfrontasi, tetapi sebagai bentuk ikhtiar moral agar pemerintah pusat dan daerah tergugah untuk bertindak lebih serius dan cepat dalam menangani banjir rob. Aksi *istighosah* ini sekaligus menjadi medium konsolidasi kesadaran warga bahwa perjuangan atas hak hidup layak tidak hanya harus disuarakan melalui saluran politik formal, tetapi juga dapat

digerakkan melalui kekuatan spiritual dan kolektifitas sosial berbasis nilai.



Gambar 10. Wawancara dengan PCNU Kabupaten Demak
Sumber: Dokumen Pribadi, 2025.

Dalam pernyataannya, KH. Muhammad Aminudin menegaskan bahwa upaya penanganan banjir rob seharusnya tidak hanya dilakukan secara reaktif atau insidental, melainkan melalui pendekatan struktural yang berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya normalisasi seluruh aliran sungai di wilayah Demak, bukan hanya di Sayung, karena banjir merupakan permasalahan sistemik yang terjadi lintas desa dan kecamatan. Ia juga menyatakan bahwa seharusnya pemerintah memiliki unit kerja yang aktif setiap hari dalam menjaga dan membersihkan saluran sungai dari lumpur dan sedimen, serta melakukan pemeliharaan tanggul secara berkala, bukan menunggu hingga terjadi bencana baru kemudian bereaksi. Lebih lanjut, beliau menyoroti rendahnya kesadaran sebagian masyarakat yang turut mempersempit aliran sungai dengan

memanfaatkan bantaran sungai secara ilegal, sehingga menyebabkan kapasitas tampung sungai menurun dan memperparah genangan saat pasang naik.

“Ya harus ada normalisasi seluruh sungai, tidak hanya Sayung, karena Demak itu langganan banjir. Saya berharap pemerintah itu punya alat yang bekerja secara *continue* tiap hari bekerja nungguin lumpur, tidak nunggu harus ada banjir, tidak nunggu ada tanggul jebol. Oleh karena itu harus ada penanganan intens dan tentunya harus ada kesadaran dari warga masyarakat, karena faktanya sungai-sungai menjadi sempit karena banyak warga masyarakat yang memanfaatkan hantaran sungai itu” (Wawancara, KH. Muhammad Aminudin, Ketua PCNU Kabupaten Demak, 19 Juni 2025).

Pernyataan tersebut mencerminkan kesadaran kritis dari tokoh masyarakat mengenai pentingnya perubahan sistemik dalam tata kelola lingkungan hidup di wilayah pesisir Demak. Bukan hanya menuntut perubahan dari atas, tetapi juga mendorong transformasi perilaku di tingkat masyarakat akar rumput. Dalam kerangka ini, perjuangan masyarakat Sayung melalui fasilitasi organisasi keagamaan seperti NU tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka menjadi representasi dari apa yang disebut sebagai *civil religious movement*, yaitu gerakan sosial yang menggabungkan nilai-nilai spiritual dan perjuangan sosial dalam rangka menciptakan keadilan ekologis dan kesejahteraan bersama. NU, dengan jejaring dan kharisma sosialnya, berperan sebagai aktor penghubung (*broker*) antara rakyat dengan negara, serta menjadi penyeimbang dalam struktur sosial-politik lokal yang kerap timpang.

Dengan demikian, perjuangan masyarakat terdampak banjir rob di Sayung tidak dapat dilepaskan dari kontribusi organisasi lokal yang memiliki basis keagamaan dan kepercayaan publik yang tinggi. Dalam kondisi di mana negara belum sepenuhnya hadir secara efektif, kekuatan masyarakat sipil menjadi penting untuk mengisi kekosongan peran tersebut. Perjuangan ini merupakan bentuk dari resistensi kolektif yang tidak hanya mempersoalkan kerugian material akibat banjir, tetapi juga menuntut hak-hak dasar atas lingkungan yang aman, sehat, dan layak untuk dihuni. Oleh karena itu, studi mengenai perjuangan masyarakat Sayung menjadi penting untuk menunjukkan bagaimana aktor-aktor lokal, khususnya organisasi keagamaan, dapat memainkan peran signifikan dalam proses transformasi sosial dan advokasi kebijakan publik di tingkat lokal.

Peran organisasi dan tokoh lokal ini sejalan dengan konsep *citizenship from below* (kewargaan dari bawah), dimana inisiatif masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya tidak selalu bergantung pada struktur formal negara, melainkan juga melalui kekuatan kolektif berbasis komunitas (Isin & Turner, 2002). Dalam kasus Sayung, organisasi lokal dan tokoh masyarakat tidak hanya menjadi penyambung lidah warga, tetapi juga agen transformasi sosial yang mampu menekan negara untuk memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya terhadap rakyat.

BAB V

LATAR BELAKANG PERJUANGAN MASYARAKAT SAYUNG DALAM MEMPERJUANGKAN HAK KEWARGAANNYA

A. Ketidaksetaraan Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Di tengah kondisi masyarakat terdampak banjir rob di Kecamatan Sayung, muncul kenyataan bahwa tidak semua lapisan masyarakat memiliki kemampuan dan akses yang sama untuk bertahan, beradaptasi, atau pulih dari dampak yang ditimbulkan. Ketimpangan sosial dan ekonomi terlihat sangat jelas: kelompok masyarakat dengan modal ekonomi dan sosial yang lebih besar cenderung mampu membangun rumah panggung, mengakses air bersih melalui jalur pribadi, atau bahkan pindah ke wilayah yang lebih aman. Sebaliknya, warga dari kalangan ekonomi rendah terpaksa tetap tinggal di wilayah yang terus-menerus tergenang tanpa fasilitas dasar yang memadai. Ketimpangan ini menciptakan situasi ketidakadilan struktural yang tidak hanya memperparah penderitaan kelompok rentan, tetapi juga mempersempit ruang aktualisasi mereka sebagai warga negara yang seharusnya memiliki hak yang sama atas perlindungan dan kesejahteraan.

“Ya mau pindah ya gak mau mba, wong ini tanah udah dari dulu ditempati, nyari makan yo di sini, makanya dari dulu menuntut pemerintah demak buat ngasih solusi, tapi sampai sekarang buktinya apa bisa dilihat sendiri masih rob” (Wawancara, Sutyo, Masyarakat Desa Sidogemah, 13 Junu 2025).

Rob yang telah berlangsung dalam waktu yang lama memaksa masyarakat sayung untuk beradaptasi. Masyarakat dahulunya menggantungkan hidup di sector perikanan dan pertanian dengan membudidaya ikan lewat tambak dan menggarap lahan-lahan persawahan pada sekarang ini tidak dapat mengerjakan pekerjaannya lagi. Pada tahun 2009 tercatat kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan lahan pertanian dan pertambakan mencapai 12,7 miliar pertahun. Hal ini menyebabkan masyarakat mulai mencari pekerjaan lain untuk terus menyambung hidupnya salah satunya menjadi buruh industri yang dirasa lebih aman dari dampak rob.

Adaptasi yang dilakukan masyarakat sayung yang semula bekerja di sektor pertanian dan pertambakan dan kini menjadi buruh industri membuat masyarakat perlu waktu untuk meningkatkan kemampuannya agar dapat bekerja dengan baik sebagai buruh industry. Meskipun telah bekerja sebagai buruh, sektor industri umumnya memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan sektor perikanan atau pertanian yang dahulu dikelola dengan lebih mandiri dan berbasis sumber daya alam yang lebih melimpah. Sementara masyarakat di luar daerah yang tidak terdampak langsung oleh banjir rob tetap dapat mengandalkan pekerjaan di sektor-sektor yang lebih stabil dan tidak terlalu bergantung pada kondisi alam, seperti sektor industri atau jasa, yang cenderung memberikan kestabilan ekonomi.

Ketimpangan tersebut tidak hanya mencerminkan perbedaan kondisi ekonomi semata, tetapi juga menunjukkan terbatasnya akses terhadap layanan negara dan representasi politik yang adil. Dalam hal ini, ketidaksetaraan bukan sekadar soal kemiskinan, tetapi menyangkut relasi kuasa dan distribusi sumber daya yang tidak merata. Pemerintah dinilai belum hadir secara adil dalam merespons kebutuhan dan tuntutan masyarakat terdampak. Penanganan yang bersifat sementara, seperti bantuan logistik saat genangan tinggi, tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan struktural yang membutuhkan kebijakan jangka panjang.

Ketimpangan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan, memicu perjuangan masyarakat Sayung dalam memperjuangkan hak-hak kewarganegaraannya. Perjuangan tersebut tidak hanya timbul dari keresahan atas dampak fisik banjir rob, tetapi juga dari rasa ketidakadilan karena negara dinilai gagal memenuhi hak-hak dasar mereka seperti hak atas tempat tinggal layak, lingkungan yang aman, air bersih, pekerjaan, dan kesehatan.

Masyarakat mulai bersuara melalui berbagai medium: pengaduan ke lembaga pemerintah, pengorganisasian komunitas, keterlibatan dalam musyawarah perencanaan desa, serta kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah yang memiliki perhatian pada isu keadilan sosial dan lingkungan. Perlawanan dan perjuangan ini merefleksikan bahwa masyarakat Sayung tidak bersikap pasif di tengah krisis, tetapi justru menunjukkan peran aktif sebagai subjek yang sadar akan hak-haknya. Dalam konteks teori kewarganegaraan

kritis, perjuangan ini mencerminkan proses klaim warga negara terhadap hak-haknya dalam situasi ketimpangan. Mereka menuntut pengakuan, distribusi yang adil atas sumber daya, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka.

B. Ketidakpuasan Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah

Ketidakpuasan ini diperparah oleh komunikasi yang tidak transparan antara pemerintah dan masyarakat, serta minimnya akses masyarakat terhadap informasi kebijakan yang menyangkut keberlangsungan hidup mereka. Dalam beberapa kasus, masyarakat bahkan merasa bahwa aspirasi mereka tidak diakomodasi, dan kepentingan ekonomi makro atau pembangunan infrastruktur lebih diutamakan daripada kebutuhan dasar warga terdampak. Kondisi ini memunculkan ketegangan antara negara dan warga negara, serta menciptakan ruang resistensi sosial yang mendorong lahirnya berbagai bentuk perjuangan kolektif.

1. Respon Pemerintah Kurang Tanggap dalam Mengatasi Permasalahan Banjir Rob

Banjir rob yang melanda Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, telah berlangsung secara kronis sejak awal tahun 2000-an. Saat ini banjir rob telah menjadi persoalan multidimensi yang menyentuh aspek lingkungan, sosial, ekonomi, hingga politik. Fenomena naiknya muka air laut yang menyebabkan genangan secara berkala telah merusak infrastruktur vital seperti jalan

nasional pantura, jembatan penghubung antarwilayah, dan fasilitas umum lainnya.

Genangan air yang terjadi hampir setiap hari, mengakibatkan terganggunya mobilitas masyarakat dan meningkatnya risiko kecelakaan serta kerusakan kendaraan. Aktivitas ekonomi lokal juga ikut terdampak, terutama karena hasil produksi pertanian dan perikanan yang sulit didistribusikan. Data dari Pemerintah Kabupaten Demak menunjukkan bahwa sekitar 2.121 hektare lahan tambak mengalami kerusakan, dengan estimasi kerugian ekonomi mencapai Rp14,2 miliar setiap tahun. Jika dikumulatifkan sejak dua dekade terakhir, total kerugian akibat banjir rob di kawasan ini telah mencapai Rp30 triliun (Radar Kudus, 2024).

Dampak banjir rob tidak hanya terbatas pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga merambah ke sektor sosial. Proses relokasi paksa terhadap warga terdampak menimbulkan disruption sosial yang tidak kecil, termasuk hilangnya ikatan komunitas, ketidakpastian sumber penghidupan baru, dan trauma psikologis. Dalam sektor pendidikan, sekolah-sekolah sering kali harus diliburkan karena terendam air, sementara layanan kesehatan menjadi sulit diakses karena fasilitas puskesmas juga tergenang. Akumulasi dari semua permasalahan ini berkontribusi terhadap terbentuknya kemiskinan struktural yang bersifat menahun,

menjebak masyarakat pesisir dalam lingkaran kerentanan yang sulit diputus.

Respons pemerintah terhadap persoalan ini dinilai masih jauh dari memadai. Penanganan banjir rob cenderung bersifat reaktif dan terfragmentasi. Program-program seperti pembangunan rumah apung, tanggul polder, serta penanaman mangrove untuk mitigasi hanya dijalankan secara parsial dan tidak konsisten. Kebijakan tersebut belum menyentuh akar persoalan yang lebih dalam, yakni krisis tata ruang pesisir, degradasi lingkungan akibat reklamasi dan konversi lahan tambak, serta absennya mekanisme peringatan dini yang adaptif.

Dalam kerangka teori Kristian Stokke tentang partisipasi dan kewargaan demokratis, lemahnya respons ini mencerminkan defisit partisipasi substantif, di mana warga terdampak tidak dilibatkan secara aktif dalam perumusan kebijakan, dan aspirasi masyarakat lokal seringkali ter subordinasi oleh agenda politik atas. Selain itu, keterbatasan anggaran di tingkat daerah serta minimnya dukungan konkret dari pemerintah pusat turut memperparah keadaan. Ketiadaan skema bantuan fiskal yang memadai dan lambatnya intervensi kementerian teknis, seperti Kementerian PUPR atau KLHK, menunjukkan rendahnya prioritas penanganan rob di mata negara. Hal ini menyebabkan munculnya dorongan dari masyarakat sipil dan pemerintah daerah agar bencana rob di Demak ditetapkan sebagai bencana nasional,

dengan harapan akan memicu percepatan penanganan berbasis lintas kementerian dan lintas sektor.

Saat ini penanganan banjir rob membutuhkan pendekatan holistik dan kolaboratif, tidak hanya dalam aspek teknis seperti pembangunan infrastruktur pengendali banjir, tetapi juga melalui pemberdayaan sosial, penguatan tata kelola pesisir, serta kejelasan kerangka kebijakan adaptasi perubahan iklim. Pemerintah perlu melakukan perencanaan jangka panjang yang berpihak pada masyarakat terdampak, dengan memperkuat mekanisme respons cepat, alokasi anggaran yang adil, dan keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik.

2. Pembangunan Jalan Tol Sebagai Solusi Memicu Terjadinya Permasalahan Lain

Pembangunan infrastruktur strategis seperti Jalan Tol Semarang–Demak, khususnya pada Seksi II yang melintasi wilayah Sayung hingga Kaligawe, pada awalnya dirancang sebagai bagian dari upaya mitigasi terhadap bencana banjir rob yang telah lama melanda kawasan pesisir utara Kabupaten Demak. Jalan tol ini tidak hanya difungsikan sebagai jalur transportasi cepat, tetapi juga diklaim akan berperan sebagai tanggul laut yang dapat menahan limpasan air pasang dari Laut Jawa. Namun, dalam praktiknya, kehadiran proyek jalan tol justru memunculkan paradoks baru dalam penanganan rob.

Alih-alih mengurangi dampak, sejumlah laporan lapangan dan kesaksian warga menunjukkan bahwa pembangunan tol menyebabkan peningkatan intensitas genangan air rob di sejumlah wilayah yang sebelumnya tidak terlalu terdampak. Kondisi ini terjadi karena perubahan struktur tata ruang dan sirkulasi air permukaan akibat keberadaan tanggul dan timbunan jalan tol yang membentang secara longitudinal di sepanjang garis pantai. Air yang seharusnya dapat mengalir atau menyebar ke wilayah yang lebih luas kini tertahan dan terkonsentrasi di satu kawasan, mengakibatkan genangan lebih tinggi dan lebih lama di area-area tertentu seperti Desa Sidogemah, Sriwulan, dan Bedono.

“Sejak dibangunnya proyek jalan tol semarang-demak, terjadi kenaikan banjir rob secara signifikan di beberapa desa yang berada di wilayah pesisir. Pembangunan jalan tol saat ini masih belum berjalan secara optimal karena terdapat beberapa hambatan. Mulai dari belum terbangunnya kolam retensi, masih terdapat beberapa desa yang belum direlokasi karena terbatasnya lahan. Selain itu juga karena adanya keterbatasan anggaran dari pemerintah provinsi” (Wawancara, Reva Dyahningtyas, staff bidang PSDA DPUPR Kabupaten Demak, 13 Juni 2025).

Selain itu, fenomena rob menjadi semakin sulit diprediksi. Jika sebelumnya rob cenderung terjadi pada waktu-waktu tertentu (misalnya saat bulan purnama atau pasang tinggi), kini masyarakat mengeluhkan bahwa rob bisa terjadi sewaktu-waktu tanpa pola yang jelas. Hal ini menunjukkan adanya perubahan

pola hidrologi lokal yang diduga turut dipengaruhi oleh pembangunan jalan tol dan reklamasi yang tidak diikuti dengan perencanaan drainase terpadu atau sistem polder yang memadai.

Di sisi lain, pembangunan jalan tol juga membawa dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat sekitar. Beberapa wilayah mengalami pembebasan lahan yang memicu relokasi dan ketidakpastian mata pencaharian, terutama bagi petambak dan nelayan. Di wilayah yang lebih rendah, konstruksi jalan tol bahkan mempercepat laju abrasi karena hilangnya vegetasi pantai dan terganggunya ekosistem pesisir. Meskipun pembangunan jalan tol Semarang-Demak digadang-gadang sebagai solusi terhadap permasalahan banjir rob, implementasinya justru menimbulkan dampak turunan yang tidak sedikit bagi masyarakat lokal, baik dari sisi ekologis maupun sosial-ekonomi.

Dengan demikian, proyek jalan tol harus dikaji ulang dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Dibutuhkan integrasi antara kebijakan infrastruktur makro dengan perencanaan mitigasi berbasis masyarakat dan adaptasi lokal. Tanpa itu, proyek strategis nasional ini berpotensi menjadi sumber risiko baru alih-alih menjadi solusi atas krisis lingkungan yang telah berlangsung selama dua dekade di Kecamatan Sayung.

Perjuangan masyarakat Sayung kemudian muncul sebagai respons terhadap situasi tersebut. Bukan hanya sebagai bentuk

perlawanan terhadap dampak banjir rob itu sendiri, tetapi juga sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil, tidak inklusif, dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat kecil. Masyarakat mulai mengorganisasi diri, menyuarakan tuntutan secara kolektif melalui media, forum warga, hingga aksi demonstrasi. Mereka menuntut keadilan dalam distribusi sumber daya, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta pengakuan atas hak-hak mereka sebagai warga negara yang selama ini terabaikan.

Dalam kerangka teori kewargaan, perjuangan ini mencerminkan bentuk klaim terhadap hak sipil, sosial, dan politik yang seharusnya dijamin oleh negara. Masyarakat Sayung menolak menjadi objek dari kebijakan yang *top-down* dan memilih untuk mengambil posisi sebagai subjek aktif yang menyuarakan hak-haknya. Ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemerintah menjadi titik awal dari kesadaran politik dan sosial yang berkembang di tengah komunitas lokal.

C. Tuntutan Masyarakat atas Pemenuhan Hak Dasar

Masyarakat Kecamatan Sayung merasa bahwa hak-hak dasar mereka sebagai warga negara tidak dipenuhi secara adil. Ketika negara belum sepenuhnya hadir untuk memenuhi hak-hak tersebut, masyarakat berhak melakukan tuntutan sebagai bentuk perjuangan atas haknya. Berikut adalah alasan atas tuntutan yang dilakukan

masyarakat kepada pemerintah atas tidak dipenuhinya hak dasar kewargaannya.

1. Tidak Terpenuhinya Hak Atas Tempat Tinggal yang Layak

Hak atas tempat tinggal yang layak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa, *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat."* Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa setiap warga negara dapat menikmati hunian yang aman, sehat, dan layak huni. Namun dalam kenyataannya, masyarakat Kecamatan Sayung terdampak banjir rob menghadapi krisis tempat tinggal akibat banjir rob yang terjadi secara berkepanjangan.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada Desa Sriwulan, Desa Sidogemah, dan Desa Gemulak dapat diketahui bahwa sebagian besar rumah warga mengalami kerusakan permanen akibat genangan air rob yang terjadi hampir setiap hari. Rumah-rumah menjadi tidak layak huni, dinding lembap, sanitasi buruk, serta rawan penyakit dan kecelakaan. Selain itu, banyak warga harus tinggal di lingkungan yang tidak sehat dan tidak aman.



Gambar 11. Kondisi Rumah Warga Terdampak Banjir Rob di Desa Sidogemah

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025

Fenomena ini dianalisis menggunakan teori kewargaan Kristian Stokke, yang menekankan bahwa kewargaan (citizenship) tidak hanya bersifat status legal (legal citizenship). Tetapi sebagai proses praksis politik dan sosial yang disebut sebagai “citizenship as practice”. Dalam kasus masyarakat Sayung, status hukum sebagai warga negara tidak diiringi dengan pemenuhan hak-hak sosial tersebut.

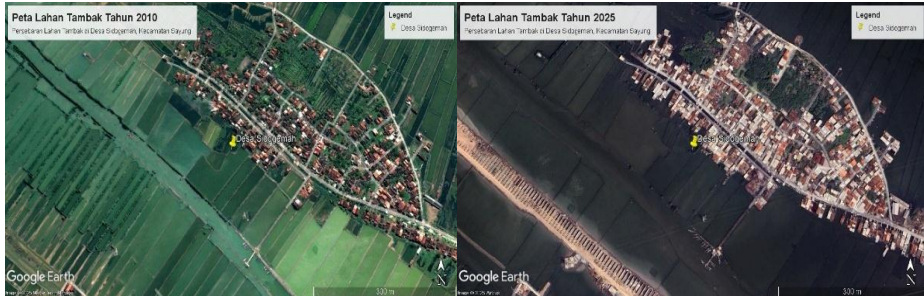
Teori Stokke juga menggarisbawahi pentingnya agensi masyarakat sipil dalam mempraktikkan kewargaan secara aktif (active citizenship). Dalam kasus Sayung, warga yang membangun rumah semi permanen di lahan tambak,

meninggikan bangunan secara swadaya, atau membentuk kelompok advokasi untuk menolak relokasi sepihak, merupakan bentuk nyata dari praktik kewargaan aktif. Mereka bukan sekadar penerima kebijakan, melainkan aktor yang memperjuangkan hak-haknya secara langsung.

Negara belum hadir secara utuh dalam menjamin tempat tinggal yang aman dan sehat, meskipun banjir rob telah menjadi permasalahan yang berlangsung lama. Kondisi ini memperkuat gagasan bahwa kewargaan substantif mereka terpinggirkan (Isin & Turner, 2002). Mereka secara legal adalah warga negara, namun hak-hak mereka tidak terjamin sebagaimana mestinya.

2. Tidak Terpenuhinya Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak

Banjir rob yang terus menerus melanda Kecamatan Sayung telah memberikan dampak besar terhadap sektor ekonomi masyarakat, khususnya dalam hal pekerjaan dan sumber penghidupan. Sebelum intensitas rob meningkat, mayoritas penduduk di wilayah ini menggantungkan hidup dari sektor pertanian, perikanan tambak, dan nelayan. Namun, genangan air rob yang berlangsung lama menyebabkan kerusakan lahan pertanian, tambak, serta akses ke laut yang semakin sulit dijangkau. Akibatnya, sebagian besar masyarakat kehilangan mata pencaharian utama mereka.



Gambar 12. Perubahan Lahan Tambak di Desa Sidogemah Tahun 2010 dan 2025

Sumber: Google Earth, 2025

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh beberapa warga yang bertempat tinggal di Desa Sriwulan menunjukkan bahwa banyak warga beralih profesi menjadi buruh pabrik, pekerja informal, atau bahkan pengangguran tersembunyi. Pilihan pekerjaan ini tidak hanya menurunkan pendapatan rumah tangga, tetapi juga memaksa warga untuk bekerja dalam kondisi kerja yang tidak layak, tanpa perlindungan sosial, dan dengan upah minimum yang tidak mencukupi kebutuhan dasar.

Jika dikaji dalam perspektif hak asasi manusia, kondisi ini mencerminkan tidak terpenuhinya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa *"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."* Selain itu, Pasal 38 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap warga

negara berhak untuk memilih pekerjaan dan memperoleh penghidupan yang layak.

Dalam perspektif teori kewargaan oleh T.H. Marshall (1950), hak atas pekerjaan masuk dalam kategori hak sosial, yaitu hak yang memungkinkan warga negara memperoleh standar hidup yang layak melalui pekerjaan, jaminan sosial, dan perlindungan ekonomi. Marshall menegaskan bahwa hak sosial merupakan salah satu pilar utama dari kewargaan yang utuh (Marshall, 1950). Ketika masyarakat Sayung kehilangan pekerjaan dan tidak memperoleh akses terhadap sumber penghidupan yang layak, maka status kewargaan sosial mereka telah tercederai.

Kondisi ini sesuai dengan hasil analisis Sulistiyani et al. (2021) dalam jurnal *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* menunjukkan bahwa pergeseran profesi akibat bencana tidak hanya berdampak pada ekonomi rumah tangga. Tetapi juga menyebabkan peningkatan ketimpangan sosial serta penurunan indeks kesejahteraan warga. Tidak terpenuhinya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi masyarakat Sayung mencerminkan gagalnya negara dalam melindungi hak-hak sosial dan ekonomi warganya.

Permasalahan ini bukan hanya tentang persoalan ketenagakerjaan, tetapi juga persoalan kewargaan, karena tanpa akses terhadap pekerjaan yang layak, warga negara tidak mampu

menjalankan peran sosialnya secara penuh dan bermartabat. Oleh karena itu, perjuangan masyarakat Sayung untuk mendapatkan dukungan ekonomi, pelatihan kerja, dan pemulihan mata pencaharian adalah bagian dari perjuangan untuk memulihkan hak kewargaan mereka secara substantif.

3. Tidak Terpenuhinya Hak Atas Kesehatan dan Lingkungan Hidup yang Bersih

Banjir rob yang terus terjadi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, tidak hanya berdampak pada kondisi fisik permukiman dan perekonomian warga, tetapi juga menimbulkan krisis kesehatan masyarakat dan pencemaran lingkungan. Genangan air yang berlangsung dalam jangka waktu lama menyebabkan kondisi lingkungan menjadi tidak sehat: sistem sanitasi terganggu, air bersih sulit diakses, serta meningkatnya penyebaran penyakit kulit, diare, ISPA, dan penyakit berbasis lingkungan lainnya.

Hasil observasi pada Desa Sidogemah menunjukkan bahwa banyak warga masih tinggal di rumah yang tergenang air, dengan saluran pembuangan air limbah yang rusak atau tidak berfungsi. Selain itu, fasilitas kesehatan yang tersedia tidak memadai untuk menjangkau seluruh wilayah terdampak rob. Puskesmas dan layanan kesehatan keliling hanya sesekali menjangkau warga, sementara akses ke rumah sakit membutuhkan biaya dan transportasi yang sulit dijangkau saat banjir.

Dalam konteks hak asasi manusia, situasi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan hak atas kesehatan dan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, menikmati lingkungan yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Jika dianalisis dengan teori kewargaan T.H. Marshall (1950), hak atas kesehatan dan lingkungan termasuk dalam hak sosial warga negara. Marshall menekankan bahwa kewargaan sejati bukan hanya soal status hukum atau hak politik, melainkan juga kemampuan negara dalam memastikan kesejahteraan warga melalui akses terhadap layanan kesehatan dan lingkungan hidup yang layak. Ketika masyarakat Sayung tidak mendapatkan akses terhadap kedua hal tersebut, maka negara dianggap belum hadir sepenuhnya dalam memenuhi hak-hak sosial warganya.

Kurniawan et al. (2019) dalam jurnal *Environmental Health* mencatat bahwa masyarakat pesisir di wilayah Jawa Tengah memiliki kerentanan tinggi terhadap penyakit berbasis lingkungan, terutama di daerah yang terdampak rob dan sanitasi buruk. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya intervensi

pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas kesehatan preventif dan promotif secara merata.

Dengan tidak terpenuhinya hak atas kesehatan dan lingkungan hidup yang bersih di Kecamatan Sayung merupakan bentuk nyata dari kegagalan negara dalam menjamin dimensi sosial dan ekologis kewargaan. Warga Sayung menjadi kelompok sub-kewargaan (sub-citizens). Dimana mereka memiliki status administratif sebagai warga negara, tetapi tidak menikmati hak-hak dasar yang melekat pada status tersebut. Perjuangan masyarakat dalam menuntut perbaikan lingkungan, akses air bersih, dan layanan kesehatan yang merata merupakan bagian dari "acts of citizenship" (Isin & Turner, 2002), yaitu bentuk kewargaan aktif yang muncul ketika negara belum memenuhi hak-hak warganya. Oleh karena itu, tuntutan atas lingkungan hidup dan kesehatan yang layak harus dipahami sebagai bagian dari perjuangan untuk mewujudkan kewargaan substantif yang adil dan berkelanjutan.

4. Tidak Terpenuhinya Hak Atas Pendidikan

Banjir rob yang terus menerus terjadi di Kecamatan Sayung tidak hanya berdampak pada kondisi fisik permukiman dan sumber penghidupan masyarakat, tetapi juga mengganggu akses dan kualitas layanan pendidikan, terutama bagi anak-anak usia sekolah. Banyak sekolah yang terletak di wilayah terdampak mengalami genangan air setiap hari, sehingga proses belajar

mengajar menjadi tidak kondusif bahkan terhenti sementara. Beberapa sekolah terpaksa menerapkan sistem "sekolah apung" atau memindahkan kegiatan belajar ke lokasi yang lebih tinggi dan aman, namun upaya ini belum sepenuhnya menjamin keberlanjutan pendidikan siswa.

“Pendirian sekolah apung ini lahir dari keprihatinan kami terhadap kondisi pendidikan anak-anak di wilayah terdampak rob. Banyak sekolah yang sudah tidak layak digunakan karena terus-menerus tergenang. Sebagai bagian dari masyarakat sipil, NU merasa perlu hadir, meskipun dengan sarana yang sangat terbatas.” (Wawancara Aminudin, Ketua PC NU Kabupaten Demak, 19 Juni 2025).

Mengacu pada Teori Kewargaan T.H. Marshall (1950), hak atas pendidikan merupakan bagian dari hak sosial, yaitu hak yang memungkinkan setiap warga untuk berkembang sebagai individu dan sebagai bagian dari komunitas. Pendidikan berperan penting dalam memperkuat kapasitas kewargaan karena melalui pendidikan, warga dapat memahami hak dan tanggung jawabnya, serta memperoleh kesempatan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, ketika akses terhadap pendidikan terhambat, kewargaan substantif warga menjadi terpinggirkan.

UNESCO (2016) juga menekankan bahwa pendidikan dalam situasi darurat seperti bencana merupakan hak yang harus segera dipulihkan, karena pendidikan bukan hanya tentang belajar, tetapi juga memberikan rasa aman, stabilitas psikologis,

dan keberlanjutan sosial. Namun dalam kenyataannya, pemerintah daerah belum memiliki strategi yang sistematis untuk menjamin keberlanjutan pendidikan di wilayah terdampak rob seperti Sayung.

Hal ini diperkuat oleh temuan Maulida et al. (2020) dalam jurnal *Jurnal Ilmu Pendidikan* yang menyatakan bahwa anak-anak di daerah terdampak bencana di pesisir utara Jawa mengalami penurunan partisipasi pendidikan dan peningkatan angka putus sekolah, akibat minimnya dukungan infrastruktur dan ketidaksiapan sistem pendidikan dalam merespons bencana berulang.

Dengan demikian, tidak terpenuhinya hak atas pendidikan di Kecamatan Sayung merupakan bagian dari kegagalan negara dalam menjamin akses terhadap hak sosial warga negara. Status formal sebagai warga negara tidak cukup jika tidak disertai dengan jaminan terhadap akses pendidikan yang layak, aman, dan berkelanjutan. Perjuangan masyarakat untuk mempertahankan pendidikan anak-anak mereka adalah bagian dari upaya mempertahankan eksistensi kewargaan yang sejati dalam situasi yang penuh keterbatasan dan ketidakpastian.

5. Tidak Terpenuhinya Hak Atas Rasa Aman dan Perlindungan Sosial

Hak atas rasa aman dan perlindungan sosial merupakan bagian penting dari jaminan negara kepada setiap warga negara,

terutama dalam situasi bencana. Namun, dalam konteks banjir rob yang terus menerus melanda Kecamatan Sayung, masyarakat tidak hanya kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan, tetapi juga menghadapi ketidakpastian dan rasa takut yang terus menerus. Genangan air yang tidak kunjung surut, rusaknya infrastruktur dasar, serta minimnya sistem peringatan dini dan evakuasi darurat menimbulkan rasa tidak aman secara fisik, ekonomi, dan psikologis.

“Yang paling saya takutkan itu kalau air datang tengah malam, tiba-tiba masuk rumah. Anak-anak saya masih kecil, kadang sudah tidur, jadi panik semua. Pernah kami harus angkat barang-barang cepat-cepat sambil air terus naik. Rasanya nggak tenang setiap malam, selalu was-was.” (Wawancara Ibu Sukini, warga Desa Sriwulan, 13 Juni 2025)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa warga dari Desa Sriwulan, banyak warga yang mengaku khawatir akan keselamatan anak-anak dan anggota keluarga lanjut usia saat air tiba-tiba naik pada malam hari. Mereka juga merasa negara belum sepenuhnya hadir, karena bantuan sosial dan penanganan darurat bencana sering datang terlambat, terbatas, dan tidak merata. Perlindungan sosial seperti bantuan sembako, bantuan tunai, atau program perlindungan jaminan sosial juga tidak menjangkau semua warga terdampak secara berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak memperoleh rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Selain itu, Pasal 34 UUD 1945 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, yang berarti negara wajib hadir dalam memberikan perlindungan sosial terutama dalam kondisi darurat.

Dalam kajian teori kewargaan T.H. Marshall (1950), hak atas perlindungan sosial merupakan bagian dari hak sosial yang melekat pada status kewargaan seseorang. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan setiap warganya, termasuk melalui perlindungan dalam situasi krisis atau bencana. Ketika masyarakat Sayung merasa tidak aman dan tidak mendapatkan perlindungan sosial yang layak, status kewargaan mereka secara substantif menjadi lemah, karena mereka tidak menikmati hak-hak dasar yang seharusnya dijamin oleh negara.

Selain itu, menurut Isin dan Turner (2002), warga negara tidak hanya pasif menunggu perlindungan, tetapi dapat melakukan *acts of citizenship*, yaitu tindakan aktif dalam memperjuangkan hak mereka. Dalam kasus Sayung, beberapa warga terlibat dalam advokasi kebijakan, menyampaikan tuntutan

ke pemerintah, hingga membentuk komunitas lokal untuk saling membantu dalam kondisi banjir. Tindakan ini menunjukkan bahwa kewargaan aktif muncul dari keterdesakan dan ketidakhadiran negara, sekaligus menjadi upaya untuk menegaskan keberadaan dan hak mereka sebagai warga negara.

Jurnal penelitian oleh Fatimah et al. (2021) dalam *Jurnal Sosial dan Kebencanaan* menunjukkan bahwa minimnya rasa aman dan perlindungan sosial di wilayah pesisir yang terdampak bencana rob menyebabkan trauma berkepanjangan, kerentanan sosial-ekonomi, serta konflik horizontal antarwarga, terutama saat bantuan terbatas. Situasi ini membuktikan bahwa absennya perlindungan dari negara menimbulkan kerentanan multidimensi yang memperlemah ketahanan masyarakat.

Dengan demikian, tidak terpenuhinya hak atas rasa aman dan perlindungan sosial di Kecamatan Sayung mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi fungsi konstitusionalnya sebagai pelindung rakyat. Ketika hak tersebut tidak terpenuhi, maka hak-hak kewargaan lainnya juga ikut terancam. Perjuangan masyarakat Sayung untuk menuntut perlindungan bukan hanya soal bantuan bencana, tetapi juga bentuk perjuangan mempertahankan martabat dan identitas mereka sebagai warga negara yang sah.

BAB VI

PENUTUP

Pada bagian penutup ini, peneliti merangkum temuan-temuan utama berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, peneliti menyampaikan rekomendasi yang ditunjukkan kepada pihak-pihak terkait yang memiliki kepentingan terhadap hasil penelitian ini. Kesimpulan yang disusun diharapkan mampu memberikan pemahaman yang jelas kepada pembaca mengenai inti pembahasan dan jawaban atas rumusan masalah yang telah dikaji.

A. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, menunjukkan kemampuan adaptasi sosial dan perjuangan politik yang signifikan dalam menghadapi banjir rob yang berlangsung kronis. Adaptasi dilakukan melalui berbagai cara seperti peninggian rumah, pembangunan tanggul darurat, perubahan mata pencaharian, serta penggunaan teknologi sederhana seperti pompa air. Di sisi lain, masyarakat tidak hanya bertahan secara pasif, melainkan juga aktif memperjuangkan hak-hak kewargaan mereka melalui berbagai bentuk aksi kolektif, seperti pengajuan proposal, aksi demonstrasi, pemanfaatan media sosial, dan kerja sama dengan organisasi lokal seperti Nahdlatul Ulama.

Strategi-strategi ini mencerminkan implementasi nyata dari politik kewargaan sebagaimana dikemukakan oleh Kristian Stokke, di mana kewargaan tidak hanya dipahami sebagai status legal, melainkan sebagai praktik politik aktif untuk mengklaim hak-hak

dasar yang belum dipenuhi negara. Sementara itu, respons pemerintah daerah meskipun sudah ada seperti pembangunan tanggul dan program relokasi masih dinilai belum optimal akibat keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya pelibatan warga dalam proses perencanaan. Kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan kapasitas respons pemerintah menunjukkan bahwa bencana ekologis seperti banjir rob tidak hanya memerlukan pendekatan teknis, tetapi juga pendekatan politik yang menjamin keadilan sosial dan ekologis. Dengan demikian, banjir rob bukan hanya menjadi krisis lingkungan, tetapi juga krisis kewargaan yang mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga negara di wilayah rentan.

B. SARAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Demak agar meningkatkan kapasitas kelembagaan dan anggaran dalam penanggulangan banjir rob, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pengambilan kebijakan yang inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Pemerintah hendaknya tidak hanya berfokus pada solusi teknis seperti pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial-politik berupa partisipasi warga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penanggulangan bencana. Diperlukan pendekatan bottom-up yang mengakui kapasitas lokal dan menjadikan masyarakat sebagai subjek, bukan objek, dalam

proses pembangunan. Selain itu, edukasi tentang hak-hak kewargaan dan kesadaran lingkungan perlu ditingkatkan melalui program pemberdayaan komunitas dan pendidikan berbasis masyarakat.

Lembaga swadaya masyarakat dan organisasi keagamaan juga diharapkan terus memainkan peran strategis sebagai mediator antara warga dan negara dalam mendorong akuntabilitas kebijakan publik. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian ini ke wilayah pesisir lain dengan karakteristik serupa guna memperoleh pemahaman yang lebih luas dan komparatif terkait dinamika adaptasi dan perjuangan kewargaan dalam konteks krisis ekologis. Penelitian ini juga dapat dijadikan pijakan teoretis dalam mengembangkan studi tentang hak atas lingkungan hidup yang layak sebagai bagian tak terpisahkan dari hak kewargaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affitra, R. (2023, january 1). *Peran Pemerintah dalam Penyediaan Air Bersih melalui Program PAMSIMAS*. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/rama92209/63b18be208a8b55d32737112/peran-pemerintan-dalam-penyediaan-air-bersih-melalui-program-pamsimas-program-penyediaan-air-minum-dan-sanitasi-berbasis-masyarakat?>
- Amin. (2024). Kajian Perbandingan Mitigasi Kerentanan Fisik, ekonomi, sosial dan lingkungan akibat banjir rob di Demak. *Journal of Economic Resilience and Sustainable*, 47-63.
- Creswell. (2013). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Damawyanti. (2013). The Impact of Beach Abrasion on the Social Environment (Case Study in Bedono Village, Sayung Demak). *Proceeding of the National Seminar on Management of Natural Resources and The Environment* .
- Hakim, N. N. (2023). Pemenuhan Hak-hak Kewarganegaraan Miskin Kota.
- Haloho, E. H., & Purnaweni, H. (2020). Adaptasi Masyarakat Desa Bedono terhadap Banjir Rob di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. *journal of public policy and management review*, 150-158.

- Hanifah, M. H. (2021). Analisis Dampak Bencana Banjir Rob Terhadap Perubahan Struktur Sosial dan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Studi Kasus Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak).
- Indrianto, & Supomo. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Purhantara.
- Jumatiningrum, N., & Indrayati, A. (2021). Strategi adaptasi Masyarakat Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara dalam menghadapi banjir pasang air laut. *Edigeography*, 136-143.
- Kalervo, O. (1960). *Cultural shock: Adjustment to new cultural environments*. Practical Anthropology.
- Kamal, N. (2022). Analisis Bentuk dan Biaya Adaptasi Masyarakat Desa Sriwulan Kecamatan Sayung terhadap Dampak Banjir Rob.
- Kusuma, M., & Setyowati, D. L. (2016). Dampak rob terhadap perubahan sosial masyarakat di kawasan rob desa bedono kecamatan sayung kabupaten demak. *Journal of Edicational Social Studies*, 121-127.
- Mandela, & Kusuma. (2024). Politik Kewargaan Waria. *Jurnal Polinter: Kajian Politik dan Hubungan Internasional*, 1-16.
- Mandela, M. (2024). Konflik Negara dan Masyarakat: Isu Wadas dalam Perspektif Politik Kewargaan. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 30-37.
- Marfai, M. A., & Cahyadi, A. (2015). Pemetaan Partisipatif untuk Estimasi Kerugian akibat Banjir Rob di Pekalongan.
- Marfai, M., & Cahyadi, A. (2015). Pemetaan partisipatif untuk estimasi kerugian akibat banjir Rob di Kabupaten Pekalongan.

- Miles, & Huberman. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Moleong. (2010). *Metode Penelitian*. jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, A., & Najicha, F. (2023). Pemenuhan Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Hidup yang Sehat. *Yustisia*, 108-121.
- Panda. (2024, July 11). *Panda*. Retrieved from <https://www.panda.id/akses-air-bersih-yang-terjangkau-peran-pemerintah-dan-swadaya-masyarakat-dalam-pengelolaan-air-di-desa/>
- Pradoto, W., & Ariviyanti, N. (2014). Faktor-faktor yang meningkatkan resiliensi masyarakat dalam menghadapi bencana rob di Keluarahn Tanjung Emas Semarang. *UNIVERSITAS DIPONEGORO*.
- Raseukiy, S. (2022). Membaca Kebijakan Hukum dalam Pemenuhan Hak atas Lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia universal. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1-24.
- Riyandi, E. (2021). Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi bagi Penyandang Disabilitas di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
- Rommiyati, A., & Nasihah, I. A. (2024). Penanganan Bencana Banjir Demak: Komparasi Pendekatan dan Budaya Lokal di Demak dan Kudus. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 76-83.

- Saifudin. (2022, May 25). *Detik Jateng*. Retrieved from <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6094575/banjir-rob-di-demak-masih-tinggi-warga-mulai-antre-air-bersih>
- Sarasadi, & Rudiarto. (2021). Kerentanan dan Startegi Adaptasi Masyarakat terhadap Bencana Rob di Kawasan Pesisir Kecamatan Sayung Demak. *Teknik PWK*, 91-102.
- Sari, S. (2024, May 8). *Lingkar Jateng.id*. Retrieved from <https://lingkarjateng.id/2024/05/rob-di-demak-makin-parah-warga-capek-meninggikan-rumah-keluar-uang-terus/>
- Sears, D. O. (1988). *Psikologi Sosial*. Erlangga.
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2017). *Ssosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Stokke, K., & Hiariej, E. (2018). *Politik Kewargaan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Subagiyo, A., Wijayanti, & Zakiyah, D. M. (2017). *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: alfabeta.
- Suparlan, P. (1993). *Adaptasi dalam Antropologi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Susilo. (2025, Januari 19). *Media MK Info*. Retrieved from <https://www.mk-info.co.id/banjir-rob-tak-kunjung-surut-selama-tiga-bulan-warga-desa-sayung-mengeluh/>

- Waluyo, D. (2024, September 27). *Indonesia.Go.ID*. Retrieved from [ndonesia.go.id/kategori/editorial/8627/air-bersih-dan-sanitasi-untuk-semua-tantangan-dan-peluang-menuju-indonesia-sehat?](https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8627/air-bersih-dan-sanitasi-untuk-semua-tantangan-dan-peluang-menuju-indonesia-sehat?)
- Wattimena, J. (2021). Pemenuhan Hak atas Air bersih dan sehat, serta hak menggugat masyarakat. *BALOBELAW JOURNAL*, 1-16.

LAMPIRAN

1. Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986, Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 1361/Un.10.6/D1/KM.05.01/06/2025
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

5 Juni 2025

Yth.
Dinas Pekerjaan Umum
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "*Adaptasi Masyarakat dalam Menghadapi Banjir Rob dan Respons Pemerintah: Studi Fenomenologi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak*" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Ely Rahmawati
NIM : 2106016049
Semester : VIII
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Semarang, 3 Juli 2002
CP/e-mail : 082226310874/rahmSuwarniawatiely@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Nur Chamin/ Suwarni
Pekerjaan : IRT
Alamat : Jl. Ki wongso Kusumo/RT.2 RW.9/ Gemuk/ Kota Semarang

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

2. Dokumentasi Kegiatan



Wawancara bersama narasumber
warga desa sriwulan



Wawancara bersama narasumber
warga desa sidogemah



Wawancara bersama Sekretariat
BPBD Kabupaten Demak



Wawancara bersama staff bidang
PSDA DPUPR Kabupaten Demak



Observasi di desa Gemulak



Observasi di desa Sidogemah